DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

"Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan yang Cukup secara Berkelanjutan untuk Memperkuat Kedaulatan Pangan"

LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 018

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
AUDITED

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 16 Mei 2019
Direktur Jenderal

Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, MS, D.A.A
NIP. 196010241987031001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	65
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	78
Lampiran	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	11
Tabel 2.	Perbandingan Pagu Anggaran Definitif dan Revisi per 30 September 2018 Berdasarkan Program	12
Tabel 3.	Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	15
Tabel 4.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel 5.	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	18
Tabel 6.	Perbandingan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2018	20
Tabel 7.	Perbandingan Anggaran Belanja Awal dan Revisi per Kegiatan	21
Tabel 8.	Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018	21
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	22
Tabel 10.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 Berdasarkan Jenis Belanja	23
Tabel 11.	Rincian Anggaran dan Realisasi Netto per 31 Desember 2018 Berdasarkan Program	24
Tabel 12.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2018 Berdasarkan Kegiatan	24
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 Berdasarkan Jenis Belanja	25
Tabel 14.	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	25
Tabel 15.	Rincian Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	26
Tabel 16.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2018	27
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
Tabel 18.	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
Tabel 19.	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	32
Tabel 20.	Perbandingan Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	32
Tabel 21.	Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	33
Tabel 22.	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	34
Tabel 23.	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	35
Tabel 24.	Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	36
Tabel 25.	Rincian Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2018	38
Tabel 26.	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	38
Tabel 27.	Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	40
Tabel 28.	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA 2018	40

Tabel 29. Perbandingan Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 41
Tabel 30. Rincian Persediaan Bahan Baku per 31 Desember 2018 43
Tabel 31. Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 44
Tabel 32. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018 46
Tabel 33. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 46
Tabel 34. Rincian Nilai Aset Tetap Tanah per Satker per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 47
Tabel 35. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 56
Tabel 36. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 56
Tabel 37. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 56
Tabel 38. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 57
Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 62
Tabel 40. Rincian Kewajiban Jangka Pendek 62
Tabel 41. Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 63
Tabel 42. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 63
Tabel 43. Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 65
Tabel 44. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 66
Tabel 45. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 67
Tabel 46. Perbandingan Beban barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 68
Tabel 47. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 69
Tabel 48. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 69
Tabel 49. Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 70
Tabel 50. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 71
Tabel 51. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 72
Tebal 52. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 72
Tabel 53. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2018 74
Tabel 54. Transaksi Antar Entitas per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 77

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 23

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran A. Printout Laporan Keuangan	82
Lampiran B. Data Hibah FAO	83
Lampiran C. Monitoring Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	84
Lampiran D. Monitoring Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas	85
Lampiran E. Monitoring Saldo Piutang Bukan Pajak dan Piutang TP/TGR	86
Lampiran F. Printout Laporan Barang Milik Negara	87
Lampiran G. Laporan Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2017	88
Lampiran H. Data Bank Garansi	89
Lampiran I. Data Tunda Bayar – Utang Pihak Ketiga	90
Lampiran J. Data Pendapatan Diterima Dimuka	91

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 16 Mei 2019
Direktur Jenderal

Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, MS, D.A.A
NIP. 196010241987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.018.03 Belanja Sektoral Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2018 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp131.243.072.739,00 atau mencapai 2.788,59% dari estimasi Pendapatan-LRA yang dilaporkan sebesar Rp4.706.436.000,00.

Realisasi Belanja Negara (*netto*) sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.100.524.309.795,00 atau mencapai 91,39% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.675.409.495.000,00 dengan realisasi terbesar adalah belanja barang, yaitu Rp6.040.067.982.560,00.

Realisasi belanja barang salah satunya adalah belanja 526, yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada kegiatan-kegiatan seperti Fasilitas Penerapan Budidaya Padi dan Jagung; Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai, Aneka Kacang dan Umbi Lainnya; Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat; Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI; Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan; serta Fasilitas Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.

Adapun realisasi belanja 526 adalah Rp5.561.553.597.691,00 atau 91,93% dari pagu anggarannya sebesar Rp6.049.628.155.000,00.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.869.548.295.255,00 yang terdiri dari: Aset Lancar (netto) sebesar Rp60.883.543.456,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.783.891.147.517,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp8.910.837.497,00 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp15.862.766.785,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp51.484.469.126,00 dan Rp1.818.063.826.129,00.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.870.706.919,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.140.575.975.254,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.131.705.268.335,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp114.280.094.993,00 dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp6.017.425.173.342,00.

Dari realisasi belanja 526 sebesar Rp5.561.553.597.691,00, menjadi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sejumlah Rp5.562.430.507.890,00.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp1.268.023.976.123,00 ditambah Defisit-LO periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 sebesar Rp6.017.425.173.342,00, kemudian ditambah koreksi-koreksi yang menambah Ekuitas senilai Rp589.946.288.878,00 pada Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dan Koreksi Lain-lain,

serta Transaksi Antar Entitas senilai Rp5.977.518.734.470,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp1.818.063.826.129,00.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Adapun printout Laporan LRA, Neraca, LO, dan LPE terdapat pada Lampiran A (halaman 82)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		% thd Angg	31 DESEMBER 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4,706,436,000	131,243,072,739	2788.59	25,954,355,015
JUMLAH PENDAPATAN		**4,706,436,000**	**131,243,072,739**	**2788.59**	**25,954,355,015**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	49,516,144,000	43,496,315,489	87.84	44,613,818,782
Belanja Barang	B.4	6,582,781,439,000	6,040,067,982,560	91.76	6,307,042,149,940
Belanja Modal	B.5	43,111,912,000	16,960,011,746	39.34	14,339,712,836
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		**6,675,409,495,000**	**6,100,524,309,795**	**91.39**	**6,365,995,681,558**

NERACA

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-18	31 des 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	46,276,000	477,367,800
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	11,296,175,396	28,550,741,036
Belanja Dibayar di Muka	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	43,739,206,731	40,634,979
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	C.5	(259,271,786)	(1,048,950)
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	5,775,500,693	3,820,101,594
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	C.7	(3,621,830,656)	(3,820,101,594)
Persediaan	C.8	3,907,487,078	8,050,919,658
Persediaan Yang Belum Diregister	C.9	-	-
Jumlah Aset Lancar		**60,883,543,456**	**37,118,614,523**
ASET TETAP			
Tanah	C.10	1,550,221,115,200	994,039,613,091
Peralatan dan Mesin	C.11	518,439,552,275	551,266,528,361
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.12	-	-
Gedung dan Bangunan	C.13	161,507,869,265	157,482,593,804
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.14	11,719,799,171	20,747,540,611
Aset Tetap Lainnya	C.15	2,528,046,150	6,465,106,050
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.16	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.17	(460,525,234,544)	(478,757,201,544)
Jumlah Aset Tetap		**1,783,891,147,517**	**1,251,244,180,373**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	9,042,914,825	905,869,746
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.19	(132,077,328)	(77,760,597)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		**8,910,837,497**	**828,109,149**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	810,523,275	853,073,275
Aset Lain-Lain	C.21	58,808,505,504	27,474,850,202
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(43,756,261,994)	(25,594,259,119)
Jumlah Aset Lainnya		**15,862,766,785**	**2,733,664,358**
JUMLAH ASET		**1,869,548,295,255**	**1,291,924,568,403**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.23	51,403,193,126	23,423,224,480
Pendapatan Diterima Dimuka	C.24	35,000,000	477,367,800
Uang Muka dari KPPN	C.25	46,276,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		51,484,469,126	23,900,592,280
JUMLAH KEWAJIBAN		**51,484,469,126**	**23,900,592,280**
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	1,818,063,826,129	1,268,023,976,123
JUMLAH EKUITAS		1,818,063,826,129	1,268,023,976,123
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1,869,548,295,255**	**1,291,924,568,403**

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya	D.1	8,870,706,919	11,140,821,147
JUMLAH PENDAPATAN		**8,870,706,919**	**11,140,821,147**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	43,723,241,357	44,613,818,782
Beban Persediaan	D.3	14,235,785,363	19,552,439,105
Beban Barang dan Jasa	D.4	243,306,863,264	243,181,523,667
Beban Pemeliharaan	D.5	12,975,095,836	13,792,827,086
Beban Perjalanan Dinas	D.6	217,854,579,793	193,464,499,170
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	5,562,430,507,890	5,221,990,026,239
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	45,912,957,897	44,421,455,939
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	136,943,854	86,518,398
Beban Lain-Lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		**6,140,575,975,254**	**5,781,103,108,386**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(6,131,705,268,335)**	**(5,769,962,287,239)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	(18,599,647,056)	(3,797,509,135)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	67,327,600	49,250,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14	18,666,974,656	3,846,759,135
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	132,879,742,049	41,618,472,003
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	137,021,838,577	142,862,384,913
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	4,142,096,528	101,243,912,910
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		114,280,094,993	37,820,962,868
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(6,017,425,173,342)**	**(5,732,141,324,371)**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.18	0	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(6,017,425,173,342)**	**(5,732,141,324,371)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
EKUITAS AWAL	E.1	1,268,023,976,123	(200,668,581,428)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,017,425,173,342)	(5,732,141,324,371)
Penyesuaian Nilai Aset	E.3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E.4		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	434,991,603,533	822,584,352,894
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	155,869,235,345	27,124,400,858
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	(914,550,000)	346,471,886
JUMLAH		589,946,288,878	850,055,225,638
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	5,977,518,734,470	6,350,778,656,284
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	550,039,850,006	1,293,875,975,308
EKUITAS AKHIR	E.7	**1,818,063,826,129**	**1,268,023,976,123**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan salah satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga, pembangunan Indonesia difokuskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Adapun prioritas sasaran yang akan dicapai selama tahun 2015-2019, yang disebut Nawacita, menetapkan sembilan perubahan, diantaranya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa Asia lainnya dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi tersebut, ditetapkan lima prioritas sasaran, yaitu:

1. Membangun kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan kedaulatan energi;
3. Mewujudkan kedaulatan keuangan;
4. Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM; dan
5. Mewujudkan penguatan teknologi.

Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Selain itu, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat bersentuhan dengan prioritas keenam dan ketujuh dari nawacita, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mewujudkan kemandirian ekonomi.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki batasan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi tertentu. Sesuai prioritas pembangunan Kabinet Kerja 2015-2019, telah ditetapkan lima komoditas pangan utama sebagai sasaran swasembada, tiga diantaranya adalah komoditas tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai, serta komoditas di luar tanaman pangan yaitu Gula dan Daging.

Selain itu, selama tahun 2015-2019 terdapat empat komoditi yang harus ditingkatkan produksinya yaitu padi dalam rangka swasembada, jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal, kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe, serta ubi kayu sebagai penyedia bahan baku bio-industri.

Sebagai penanggung jawab simpul koordinasi dalam pembangunan tanaman pangan, dan dengan mempertimbangkan permasalahan, tantangan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah ***"mewujudkan pemenuhan kebutuhan yang cukup secara berkelanjutan untuk memperkuat kedaulatan pangan".*** Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah:

1. **Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan;**
2. **Mengembangkan komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah dan daya saing; serta**
3. **Mengembangkan komoditas tanaman pangan yang mendukung Bioindustri.**

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

a. Mewujudkan swasembada padi, jagung, dan meningkatnya produksi kedelai;
b. Berkembangnya komoditas tanaman pangan bernilai ekonomi; dan
c. Mendukung penyediaan bahan baku bioindustri.

Oleh karena itu sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah: Terwujudnya peningkatan produksi dan daya saing Tanaman Pangan; dan Terwujudnya peningkatan produksi tanamaan pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
2. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain
3. Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.

4. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.
5. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.
6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

A.2. Implementasi Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi E Rekonsiliasi LK

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengimplementasikan Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi E Rekonsiliasi LK sejak tahun 2016 sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-4839/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN bulan Januari sampai dengan Mei 2016. Hal ini dipertegas dengan surat edaran nomor 11000/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 *(Unaudited),* bahwa Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan melalui Aplikasi E Rekonsiliasi LK sesuai dengan jadwal *open* dan *close period.*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Semester II Tahun 2018 Audited merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah 70 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 70

satker (100%). Rincian satker tersebut tersaji pada **Tabel 1.** berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

No.	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	03	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	34	-	70
Jumlah			**1**	**-**	**2**	**-**	**33**	**-**	**34**	**-**	**70**

Keterangan:
M : Menyampaikan
TM : Tidak Menyampaikan

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui aplikasi e Rekon LK per tanggal 22 April 2019.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Satker melakukan unggah (upload) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA berbentuk file kirim ke KPPN yang sudah melalui proses verifikasi awal oleh Tim Verifikator Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
2. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SIMAK-BMN secara berjenjang.
3. Melakukan Workshop terpadu dengan mengundang seluruh Satker, serta Tim Verifikasi dari Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Tim Reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian guna verifikasi terakhir dan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Penyusunan laporan keuangan berjenjang dari Satker ke Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Pada Tahun 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerima alokasi Pagu Definitif APBN senilai Rp6.484.163.359.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yang menyebabkan pagu anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp6.675.409.495.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Definitif dan Revisi yang tercatat di Laporan Keuangan (SAIBA) per 31 Desember 2018 seperti tampak pada **Tabel 2.**

Tabel 2. Perbandingan Pagu Anggaran Definitif dan Revisi per 31 Desember 2018 Berdasarkan Program

PROGRAM	ANGGARAN SEMULA (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)	% +/-
Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan	6,484,163,359,000	6,675,409,495,000	2.95
Total Belanja	6,484,163,359,000	6,675,409,495,000	2.95

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya seperti pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a) Tanah
  b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tetap seperti pada **Tabel 4** di bawah ini.

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR} dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas} bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum penggolongan masa manfaat Aset Tak Berwujud tampak pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah mengadakan revisi tambah dan kurang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yang menyebabkan pagu anggaran mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran karena adanya *refocusing*, yaitu penambahan pagu anggaran pada kegiatan perbenihan tanaman pangan dan pemasaran dan pengolahan hasil tanaman pangan yang merupakan limpahan anggaran dari Ditjen Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada akhir tahun 2018 terdapat pengurangan pagu anggaran untuk kontribusi pembayaran rapel tunjangan kinerja, sehingga dalam Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 Audited jumlah pagu anggaran setelah revisi senilai Rp6.675.409.495.000,00. Sementara estimasi pendapatan per 31 Desember 2018 adalah Rp4.706.436.000,00. Adapun perbandingan pagu anggaran awal dan revisi seperti pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Perbandingan Estimasi dan Pagu Anggaran Awal dan Revisi Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pend dari penjualan, pengelolaan BMN dan iuran Badan Usaha	2,900,803,000	2,908,794,000
Pendapatan Administras dan Penegakan Hukum	970,263,000	962,272,000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	60,500,000	60,500,000
Pendapatan Jasa Lainnya	774,870,000	774,870,000
Jumlah Pendapatan	**4,706,436,000**	**4,706,436,000**
Belanja Pegawai	56,165,000,000	49,516,144,000
Belanja Barang	6,390,419,987,000	6,582,781,439,000
Belanja Modal	40,379,364,000	43,111,912,000
Jumlah Belanja	**6,486,964,351,000**	**6,675,409,495,000**

Berdasarkan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, maka perubahan pagu anggaran seperti tampak pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Perbandingan Anggaran Belanja Awal dan Revisi Per Kegiatan

Kegiatan	PAGU DEFINITIF (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	NAIK/TURUN (Rp)
1761. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	995,096,400,000.00	563,039,940,000.00	(432,056,460,000.00)
1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	3,876,880,635,000.00	2,856,447,065,000.00	(1,020,433,570,000.00)
1763. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	241,750,000,000.00	825,351,100,000.00	583,601,100,000.00
1764. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	248,853,654,000.00	276,133,654,000.00	27,280,000,000.00
1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	292,546,316,000.00	242,053,321,000.00	(50,492,995,000.00)
1767. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	11,500,000,000.00	11,814,000,000.00	314,000,000.00
1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	15,668,846,000.00	16,068,446,000.00	399,600,000.00
5885. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	804,668,500,000.00	1,884,501,969,000.00	1,079,833,469,000.00
JUMLAH	**6,486,964,351,000.00**	**6,675,409,495,000.00**	**188,445,144,000.00**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp131.243.072.739,00 atau mencapai 2.788,59% dari estimasi pendapatan sebesar Rp4.706.436.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018

Uraian	Pendapatan per 31 Desember 2018		
	Estimasi	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	2,908,794,000	3,581,487,350	**123.13**
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	962,272,000	1,576,220,586	**163.80**
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	60,500,000	1,260,000	**2.08**
Pendapatan Jasa Lainnya	774,870,000	1,139,092,918	**147.00**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	-	19,359,177,934	-
Pendapatan Denda	-	2,344,675,155	-
Pendapatan Lain-lain	-	103,241,158,796	-
Jumlah Bruto	**4,706,436,000**	**131,243,072,739**	**2,788.59**
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah Netto	**4,706,436,000**	**131,243,072,739**	**2,788.59**

Secara umum realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 405,67% dibandingkan 31 Desember 2017, seperti terlihat pada **Tabel 9.**

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	3,581,487,350	3,264,859,805	9.70
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1,576,220,586	-	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	1,260,000	-	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	1,139,092,918	-	0.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	19,359,177,934	3,481,097,046	456.12
Pendapatan Denda	2,344,675,155	4,291,060,541	(45.36)
Pendapatan Lain-lain	103,241,158,796	14,917,337,623	592.09
Jumlah	**131,243,072,739**	**25,954,355,015**	**405.67**

Adanya peningkatan pendapatan disebabkan meningkatnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Peningkatan Pendapatan Lain-lain (592,09%) yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL pada kegiatan Kedelai APBN-P Tahun 2017 sangat berperan dalam peningkatan pendapatan ini. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan (456,12%), Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha (9,70%), serta Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum dan Pendapatan Jasa Lainnya, yang mana pada tahun 2017 adalah Nihil juga mempengaruhi peningkatan pendapatan.

Adapun penurunan pendapatan terjadi pada Pendapatan Denda yaitu sebesar 45,36%.

B.2 BELANJA

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2018 yang dialokasikan untuk Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan adalah Rp6.675.409.495.000,00 dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp6.100.524.309.795,00 atau 91,39%, dengan realisasi terbesar adalah belanja barang, yaitu sebesar Rp6.040.067.982.560,00. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan pendukung meliputi:

- 1761.Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- 1762.Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
- 1763.Pengelolaan Sistem penyediaan Benih Tanaman Pangan
- 1764.Penguatan Perlindungan TP dari gangguan OPT dan DPI
- 1766.Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen TP
- 1767.Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
- 1768.Pengembangan Peramalan Serangan OPT
- 5885.Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Tabel 10. menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	31 DESEMBER 2018		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	49,516,144,000	43,534,127,170	87.92
Belanja Barang	6,582,781,439,000	6,107,862,845,605	92.79
Belanja Modal	43,111,912,000	16,960,011,946	39.34
Total Belanja Kotor	**6,675,409,495,000**	**6,168,356,984,721**	**92.40**
Pengembalian Belanja	-	67,832,674,926	-
Total Belanja Netto	**6,675,409,495,000**	**6,100,524,309,795**	**91.39**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam **Grafik 1.**

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Adapun realisasi belanja berdasarkan Program per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2018 Berdasarkan Program

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan	6,675,409,495,000	6,100,524,309,795	91.39
Realisasi Belanja Netto	6,675,409,495,000	6,100,524,309,795	91.39

Sementara realisasi belanja netto per 31 Desember 2018 berdasarkan kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 12**.

Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2018 Berdasarkan Kegiatan

NO	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	1761. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	563,039,940,000.00	509,305,045,415.00	90.46
2	1762. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	2,856,447,065,000.00	2,677,043,893,952.00	93.72
3	1763. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	825,351,100,000.00	740,325,511,944.00	89.70
4	1764. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	276,133,654,000.00	248,470,742,138.00	89.98
5	1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	242,053,321,000.00	199,672,542,351.00	82.49
6	1767. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	11,814,000,000.00	10,877,365,708.00	92.07
7	1768 Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	16,068,446,000.00	15,401,456,576.00	95.85
8	5885. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1,884,501,969,000.00	1,699,427,751,711.00	90.18
	JUMLAH	**6,675,409,495,000.00**	**6,100,524,309,795.00**	**91.39**

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 4,17%. Penurunan realisasi belanja ini disebabkan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya sebesar 39,34% dikarenakan gagal kontrak dalam pembangunan Gedung Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Adanya kegiatan yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2018 yang menyebabkan Tunda Bayar ikut mempengaruhi penurunan realisasi belanja tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.

Tabel 13. menunjukkan perbandingan realisasi belanja netto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Netto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	43,496,315,489	44,613,818,782	(2.50)
Belanja Barang	6,040,067,982,560	6,307,042,149,940	(4.23)
Belanja Modal	16,960,011,746	14,339,712,836	18.27
Jumlah	**6,100,524,309,795**	**6,365,995,681,558**	**(4.17)**

B.3 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.496.315.489,00 dan Rp44.613.818.782,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 2,50% dibandingkan belanja pegawai per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya belanja gaji dan tunjangan PNS karena berkurangnya jumlah PNS lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dikarenakan adanya PNS yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi. Perbandingan belanja pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tampak pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja gaji pokok PNS	31,643,329,290	33,107,011,850	(4.42)
Belanja pembulatan gaji PNS	455,987	440,484	3.52
Belanja tunjangan suami/istri PNS	2,353,496,092	2,295,735,290	2.52
Belanja Tunjangan Anak PNS	695,771,059	662,763,424	4.98
Belanja Tunj Struktural PNS	1,332,035,000	1,208,300,000	10.24
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,157,070,000	1,022,725,000	13.14
Belanja Tunj PPH PNS	89,009,642	77,158,281	15.36
Belanja tunj beras PNS	1,724,384,600	1,815,859,080	(5.04)
Belanja uang makan PNS	3,328,311,500	3,299,488,000	0.87
Belanja tunjangan umum PNS	1,174,820,000	1,173,680,000	0.10
Belanja Uang Lembur	35,444,000	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**43,534,127,170**	**44,663,161,409**	(2.53)
Pengembalian Belanja Pegawai	37,811,681	49,342,627	(23.37)
Jumlah Belanja	**43,496,315,489**	**44,613,818,782**	**(2.50)**

B.4 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.040.067.982.560,00 dan Rp6.307.042.149.940,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 4,23% dibandingkan per 31 Desember 2017. Penurunan realisasi belanja barang disebabkan tingginya pengembalian belanja dibandingkan periode sebelumnya yaitu mencapai 592,99%, yaitu pengembalian belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat (5263).

Rincian perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 ada pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Rincian Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2018	REALISASI 31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	38,408,852,367	36,996,125,796	3.82
Belanja Barang Non Operasional	150,037,255,103	163,928,524,852	(8.47)
Belanja barang persediaan	11,623,295,099	15,688,131,275	(25.91)
Belanja Jasa	49,088,626,206	42,343,326,666	15.93
Belanja Pemeliharaan	11,721,137,710	11,995,509,327	(2.29)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	218,470,145,585	193,362,619,081	12.98
Belanja perjalanan luar negeri	265,413,440	504,042,000	(47.34)
Belanja barang diserahkan ke masy/pemda	1,756,565,828,359	1,947,410,600,609	(9.80)
Belanja brg penunj. DK/TP disrahkan ke masy	1,300,796,197	4,132,001,525	(68.52)
Belanja brg lainnya disrahkan ke masy/pemda	3,870,381,495,539	3,900,464,180,451	(0.77)
Jumlah Belanja Kotor	**6,107,862,845,605**	**6,316,825,061,582**	**(3.31)**
Pengembalian Belanja	(67,794,863,045)	(9,782,911,642)	592.99
Jumlah Belanja	**6,040,067,982,560**	**6,307,042,149,940**	**(4.23)**

Berdasarkan **Tabel 15**. realisasi belanja barang terbesar per 31 Desember 2018 adalah belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (MAK 526). Alokasi Belanja bantuan pemerintah (526) pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2018 yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan realisasi sebesar Rp5.628.248.120.095,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp66.694.522.404,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat netto adalah sebesar Rp5.561.553.597.691,00 atau 91,93% dari pagu anggarannya sebesar Rp6.049.628.155.000,00. Rincian belanja barang 526 dapat dilihat pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO	%
Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masy/Pemda	-	-	0	0	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda	1,581,645,179,000	1,443,865,537,313	0	1,443,865,537,313	91.29
Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kpd masy/Pemda	60,596,005,000	48,537,133,835	0	48,537,133,835	80.10
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kpd masy/Pemda	8,876,046,000	8,382,720,000	0	8,382,720,000	94.44
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	20,636,726,000	14,640,273,808	0	14,640,273,808	70.94
Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	274,001,174,000	237,279,825,726	1,468,044,255	235,811,781,471	86.06
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	6,054,700,000	3,860,337,677	0	3,860,337,677	63.76
Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi untuk diserahkan ke Pemda	913,895,000	906,807,397	0	906,807,397	99.22
Belanja barang penunjang tugas pembantuan untuk diserahkan ke Pemda	404,845,000	393,988,800	0	393,988,800	97.32
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat/Pemda	2,407,416,378,500	2,285,172,441,982	1,483,490,995	2,283,688,950,987	94.86
Belanja barang untuk bantuan lainnya yang mempunyai karaktristik bantuan pemerintah	1,689,083,206,500	1,585,209,053,557	63,742,987,154	1,521,466,066,403	90.08
Jumlah Belanja	**6,049,628,155,000**	**5,628,248,120,095**	**66,694,522,404**	**5,561,553,597,691**	**91.93**

Dari total realisasi belanja MAK 526 secara netto senilai Rp5.561.553.597.691,00 tersebut, dapat dikelompokkan menjadi belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp3.785.568.178.457,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp1.775.985.419.234,00.

Adapun penjelasan kegiatan Banpem masing-masing Direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia terdiri atas belanja dalam bentuk barang dan uang, meliputi padi dan jagung dengan rincian belanja sebagai berikut:

No	Kegiatan Padi	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	2,842	Ha	0	1,697,069,810	114
2	Peng. Budidaya Padi Khusus Lainnya	2,430	Ha	0	2,041,200,000	97
3	Peng. Bud. Padi Sub Optimal Spesifik Lokasi	50,000	Ha	0	150,978,139,110	2,000
4	Mina Padi	1,484	Ha	0	3,209,545,250	59
5	Peng. Ds. Pert. Organik Padi	7,170	Ha	0	3,533,690,000	184
6	Padi Lahan Kering	793,488	Ha	0	338,628,561,570	31,740
7	Budidaya Padi Rawa	3,000	Ha	0	6,776,400,000	83
8	Budidaya Padi Korporasi	250	Ha	0	454,195,600	10
9	UPPO	890	Unit	0	142,237,024	986
10	Budidaya Padi Inbrida Sawah	167,000	Ha	41,434,539,700	-	6,680
11	Padi Lahan Kering	52,449	Ha	19,312,989,500	-	2,098
12	UPPO	97	Unit	52,619,072,758	-	
Jumlah				113,366,601,958	507,461,038,364	

Sumber: Direktorat Serealia (data diolah)

No	Kegiatan Jagung	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Jagung Hibrida Umum-2	373,996	Ha	0	33,792,304,528	-
2	Jagung Hibrida Umum-3/Litbang	618,982	Ha	0	55,391,710,755	-
3	Jagung Komposit	1,500	Ha	0	135,000,000	-
4	Pupuk	1,640,050	Ha	0	147,602,281,689	-
5	Jagung Hibrida Lahan Eks Tambang	-	Ha	0	0	-
6	Jagung Hibrida Lahan Marjinal	1,200	Ha	0	1,035,000,000	-
7	Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi	1,000	Ha	0	485,000,000	-
8	VUB	1,100	Ha	0	866,500,000	-
9	Sorgum	-	Ha	0	0	-
10	Gandum	-	Ha	0	0	-
11	Jagung Hibrida Umum-2	1,163,762	Ha	769,919,827,721	0	-
12	Jagung Hibrida Umum-3/Litbang	1,525,685	Ha	839,057,414,372	0	-
13	Jagung Komposit	8,932	Ha	1,601,466,500	0	-
14	Jagung Hibrida Lahan Marjinal	1,135	Ha	697,440,000	0	-
15	Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi	1,000	Ha	641,604,375	0	-
16	VUB	1,700	Ha	923,190,000	0	-
Jumlah				1,612,840,942,968	239,307,796,972	

Sumber: Direktorat Serealia (data diolah)

2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi semua dalam bentuk uang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2018	543,473	Ha	0	516,988,625,000	25,290
2	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Kacang Hijau	4,975	Ha	0	3,103,400,000	282
3	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Ubi Kayu	1,500	Ha	0	900,000,000	125
4	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Ubi Jalar	500	Ha	0	300,000,000	39
5	Penerapan Teknologi Tanaman Terpadu Talas	500	Ha	0	300,000,000	98
Jumlah				0	521,592,025,000	

Sumber: Direktorat Akabi (data diolah)

3. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda untuk kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI terdiri atas:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Mobil fungsional LPHP	83	Ha	15,544,406,000	0	31
2	Motor Fungsional POPT	1,037	Ha	24,445,201,000	0	1,037
3	Pestisida	198,028	Ha	17,576,500,000	0	50
4	Rodentisida Pengasapan	174	Ha	195,000,000	0	1
5	Herbisida	2,790	Ha	150,000,000	0	3
6	Insektisida bakteri	220	Ha	195,000,000	0	2
7	Insektisida cendawan	220	Ha	195,000,000	0	2
8	Handsprayer	1,700	Ha	901,000,000	0	5
9	Pestisida Setdit	115,700	Ha	15,000,000,000	0	18
10	Laptop	0	Unit	40,000,000	0	1
11	Printer	0	Unit	9,600,000	0	1
12	Tunda Bayar Dem Area 2017	3,485	Ha		5,805,160,000	99
13	Dem Area BTS I	23,000	Ha		39,100,000,000	581
14	Dem Area BTS II	10,000	Ha		19,580,000,000	321
15	Dem Area PDPI	1,000	Ha		2,000,000,000	22
16	Herbisida	-	-		700,000,000	-
Jumlah				74,251,707,000	67,185,160,000	

Sumber: Direktorat Perlindungan TP (data diolah)

4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda untuk kegiatan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan meliputi belanja bentuk barang dan uang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Benih Padi Inbrida	647,328	Ha	154,538,577,307	-	
2	Benih Padi inbrida Lahan Kering	69,257	Ha	16,457,991,970	-	
3	Benih Padi Hibrida	101,872	Ha	88,398,776,230	-	
4	Benih Tumpangsari	22,694	Ha	15,842,608,738	-	
5	Benih Pengganti Subsidi	1,023,873	Ha	236,760,559,948	-	
6	Desa Mandiri Benih	1,990	Ha	8,423,554,108	-	
7	Benih Padi Inbrida	260,737	Ha	-	65,481,429,100	
8	Budidaya Padi VUB	5,000	Ha	-	15,262,500,000	
9	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi	7,776	Ha	-	13,951,050,000	
10	Benih Pengganti Subsidi	81,050	Ha	-	794,290,000	
11	Desa Mandiri Benih	1,990	Ha	-	25,012,619,000	
Jumlah				520,422,068,301	120,501,888,100	

Sumber: Direktorat Perbenihan (data diolah)

5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan berbentuk barang dengan rincian:

No	Kegiatan	Volume		Realisasi Bantuan Barang	Realisasi Bantuan Uang	Jumlah Keltan
1	Combine Harvester Sedang	178	Unit	29,293,789,200	0	
2	Corn Combine Harvester Sedang	75	Unit	9,819,653,000	0	
3	Corn Combine Harvester Besar	460	Unit	143,631,966,300	0	
4	Combine Harvester Multifungsi	20	Unit	6,071,323,000	0	
5	Combine Harvester Multi Jagung/Padi	245	Unit	90,015,730,950	0	
6	Combine Harvester Kecil (SP3T/Non SP3T)	130	Unit	14,523,577,000	0	
7	Combine Harvester Besar (SP3T/Non SP3T)	834	Unit	327,427,606,000	0	
8	Vertical Dryer Padi Kap 6 Ton	97	Unit	51,242,000,000	0	
9	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton (Koorporasi)	6	Unit	3,956,000,000	0	
10	Vertical Dryer Jagung 6 Ton	43	Unit	22,929,750,000	0	
11	Dryer Ultraviolet	91	Unit	11,475,524,655	0	
12	Dryer Mobile	2	Unit	473,760,000	0	
13	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton (SP3T/Non SP3T)	99	Unit	66,524,975,600	0	
14	Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton (Stainless Steel) (SP3T/Non SP3T)	115	Unit	140,613,537,500	0	
15	RMU Organik	3	Unit	874,000,000	0	
16	RMU Non Organik	15	Unit	4,510,634,000	0	
17	RMU (SP3T)	48	Unit	14,606,746,300	0	
18	RMU (Koorporasi)	6	Unit	1,648,494,000	0	
19	Grading/Packing (SP3T/Non SP3T)	72	Unit	8,288,238,709	0	
20	Power Thresher	2,087	Unit	44,175,908,800	0	
21	Corn Sheller	1,202	Unit	28,807,426,480	0	
22	Power Thresher Multiguna/Kedelai	1,368	Unit	18,395,505,500	0	
23	Pembersih Biji Kedelai	30	Unit	584,500,000	0	
24	Pengayak Kedelai	30	Unit	695,500,000	0	
25	Paddy Cleaner	-	Unit	-	0	
26	Sarana Angkut Roda 3	103	Unit	3,033,474,520	0	
27	Mouisture Tester	300	Unit	1,838,530,000	0	
28	Color Sorter	3	Unit	1,159,000,000	0	
29	Husker dan Polisher	-	Unit	-	0	
30	Bangunan RMU Non Organik	15	Unit	-	2,193,890,419	
31	Bangunan RMU Organik	3	Unit	-	485,650,000	

32	Bangunan Vertical Dryer Padi Kap. 6 Ton	97	Unit	-	24,760,049,885	
33	Bangunan Vertical Dryer Padi Kap. 10 Ton	166	Unit	-	54,114,153,024	
34	Bangunan Dryer Fluidydez	-	Unit	-	0	
35	Bangunan Vertical Dryer Jagung 6 Ton	43	Unit	-	9,984,843,160	
36	Bangunan SP3T	48	Unit	-	23,981,913,270	
37	Bangunan Koorporasi	6	Unit	-	2,989,016,714	
38	Instalasi Listrik	15	Unit	1,047,725,714	0	
39	Gudang Beras	-	Unit	-	0	
40	Lantai Jemur	75	Unit	5,387,074,000	0	
41	Vertical Dryer Padi + Bangunan Kap. 30 Ton	3	Unit	-	8,379,533,000	
42	Vertical Dryer Jagung + Bangunan Kap. 6 Ton	22	Unit	-	16,086,225,751	
43	Vertical Dryer Padi + Bangunan Kap 6 Ton	80	Unit	-	59,946,902,000	
44	Vertical Dryer Padi + Bangunan Kap 10 Ton	252	Unit	-	230,553,312,554	
45	Dryer UV	72	Unit	14,362,354,749	0	
46	Dryer Mobile	5	Unit	1,747,695,000	0	
47	RMU Organik	7	Unit	3,114,202,824	0	
48	RMU Non Organik	9	Unit	4,328,279,812	0	
49	RMU+Packing perbatasan	6	Unit	3,584,222,500	0	
50	Revitalisasi RMU (Packing dan Grading)	62	Unit	8,857,094,541	0	
51	Revitalisasi RMU (Polisher dan Husker)	68	Unit	5,082,235,500	0	
52	RMU One Pass	-	Unit	-	0	
53	RMU 2 Phase	10	Unit	2,768,175,000	0	
54	RMU	10	Unit	1,106,113,000	0	
55	RMU terintegrasi	1	Unit	283,000,000	0	
56	RMU kecil	-	Unit	-	0	
57	Power Thresher	1,349	Unit	24,903,829,600	0	
58	Corn Sheller	1,008	Unit	26,667,595,419	0	
59	Power Thresher Multiguna/Kedelai	899	Unit	20,773,534,450	0	
60	Mouisture Tester	225	Unit	1,581,574,000	0	
61	Lantai Jemur	5	Unit	310,000,000	0	
62	Sarana Angkut Roda 3	212	Unit	6,679,221,748	0	
63	Sarana Pengolahan Jagung	33	Unit	2,868,953,008	0	
64	Sarana Pengolahan Kedelai	49	Unit	4,373,102,050	0	
Jumlah				1,186,443,134,429	433,475,489,777	

Sumber: Direktorat PPHTP (data diolah)

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.960.011.746,00 dan Rp14.339.712.836,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 18,27% dibandingkan per 31 Desember 2017 dikarenakan besarnya pagu anggaran belanja modal pada tahun 2018 ini. Namun hanya terealisasi sebesar 39,34% dikarenakan gagal kontrak pembangunan Gedung kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Perbandingan realisasi belanja modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI per 31 DES 2018	REALISASI per 31 DES 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,555,610,641	11,968,929,031	4.90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	920,904,225	2,345,160,000	(60.73)
Belanja Modal Perenc. Dan Pengawasan GB	379,147,600	-	-
Belanja Modal Perizinan Ged. dan Bangunan	32,308,680	-	-
Belanja Penambahan Nilai Ged. dan Bangunan	2,658,657,800	-	-
Belanja Modal Irigasi	268,056,500	-	-
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	142,837,400	-	-
Belanja Modal Lainnya	2,489,100	25,623,805	(90.29)
Jumlah Belanja Kotor	**16,960,011,946**	**14,339,712,836**	**18.27**
Pengembalian	(200)	-	-
Jumlah Belanja	**16,960,011,746**	**14,339,712,836**	**18.27**

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.555.610.441,00 dan Rp11.968.929.031,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 terdapat pada Satker Direktorat Jedneral Tanaman Pangan, BBPPMBTPH Cimanggis, dan BBPOPT Jatisari, yang mana mengalami kenaikan sebesar 4,90% dibandingkan tahun 2017.

Tabel 18. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI per 31 DES 2018	REALISASI per 31 DES 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,555,610,641	11,940,723,381	5.15
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	28,205,650	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	**12,555,610,641**	**11,968,929,031**	**4.90**
Pengembalian	(200)	-	-
Jumlah Belanja	**12,555,610,441**	**11,968,929,031**	**4.90**

B.5.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp3.991.018.305,00 dan Rp2.345.160.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2018 terdapat pada Satker KP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan BBPOPT Jatisari. Adapun realisasi per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar 70,18% dibandingkan per 31 Desember 2017 karena besarnya pagu anggaran yang direncanakan untuk pembangunan Gedung

Kantor Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan namun tidak terealisasi karena gagal kontrak.

Tabel 19. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI per 31 DES 2018	REALISASI per 31 DES 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	920,904,225	-	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan GB	379,147,600	-	0.00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	32,308,680		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,658,657,800	2,345,160,000	13.37
Jumlah Belanja Kotor	**3,991,018,305**	**2,345,160,000**	**70.18**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**3,991,018,305**	**2,345,160,000**	**70.18**

B.5.3 BELANJA MODAL JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp410.893.900,00 dan Rp0,00. Belanja Modal JIJ tahun 2018 terdapat pada Satker BBPOPT Jatisari dan BBPPMBTPH Cimanggis.

Tabel 20. Perbandingan Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI per 31 DES 2018	REALISASI per 31 DES 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	0.00
Belanja Modal Irigasi	268,056,500	-	0.00
Belanja Modal Jaringan	-	-	0.00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	142,837,400		
Jumlah Belanja Kotor	**410,893,900**	**-**	**0.00**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**410,893,900**	**-**	**0.00**

B.5.4 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.489.100,00 dan Rp25.523.805,00. Belanja modal lainnya terdapat pada Satker BBPOPT Jatisari berupa pembelian Software Antivirus.

Tabel 21. Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	REALISASI per 31 DES 2018	REALISASI per 31 DES 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	2,489,100	25,623,805	(90.29)
Jumlah Belanja Kotor	**2,489,100**	**25,623,805**	**(90.29)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**2,489,100**	**25,623,805**	**(90.29)**

HIBAH

Hibah yang diterima Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan Hibah Langsung Bentuk Barang & Jasa. Hibah berasal dari FAO *"Strengthening and Revitalization of Integrated Pest Management Implementation and Pesticides Management System In Indonesia"* pada Satker Kantor Pusat yang dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan nomor hibah/grant: TCP/INS/3403, yang dimulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2015 (tahap I) dan diperpanjang mulai 29 Januari 2016 – 31 Juli 2017 (tahap II) dengan nilai USD 434.000 dan nomor Register 74886401. Proyek hibah ini diperpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2017 berdasarkan Surat FAO Nomor 0413/TCP/INS/3601/Prog.17 tanggal 24 Juli 2017. Berdasarkan Surat FAO No. 002/TCP/INS/3601/Prog.18 tanggal 3 Januari 2018, proyek hibah ini diperpanjang lagi sampai dengan 15 Februari 2018 dan telah diserahterimakan pada tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 086/TCP/INS/3403-3601/Prog.18. Rincian realisasi proyek hibah ini adalah sebagai berikut:

No	No Register	Commitment	Jangka Waktu	Realisasi Belanja Barang	Realisasi Belanja Jasa	Pengesahan	Ket
1.	74886401	USD 496.000 (2 Fase)	1 Januari 2014 – 15 Februari 2018	USD 15.004	USD 402.898	Rp5.665.497.414,00	Hibah Langsung Barang dan Jasa

Hibah telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan MP3HLBJS No. 04417 dan Persetujuan No. 201813923825100.

Adapun penjelasan dan data-data terkait Hibah FAO terdapat pada Lampiran B (halaman 83).

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp46,276,000,00 dan Rp477,367,800,00 dengan rincian seperti pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	249099. Dinas Pertanian Prov. NTT	0.00	193,550,400.00
2	249158. Dinas Pertanian Prov. NTT	0.00	283,817,400.00
3	339086. Distannak KP Prov. Papua Barat	46,276,000.00	0.00
	Total	**46,276,000.00**	**477,367,800.00**

Adapun saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satker Distannak KP Prov. Papua Barat (339086) telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 11 Januari 2019 dengan NTPN No. BF07880Q265DLQNP. Adapun monitoring saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada Lampiran C (halaman 84).

C.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C.3 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.296.175.396,00 dan Rp28.550.741.036,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Adapun perbandingan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji pada **Tabel 23**.

Tabel 23. Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Satker	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	039151 Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jawa Tengah	19.992.000,00	0,00	19.992.000,00
2	239101 Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian Kab. Sumbawa Barat	0,00	9.536,00	-9.536,00
3	179103 Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara	18.000.000,00	28.550.731.500,00	-28.532.731.500,00
4	219090 Dinas Pertanian Provinsi Maluku	42.930.000,00	0,00	42.930.000,00
5	238251 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	11.215.253.396,00		11.215.253.396,00
	Total	**Rp 11.296.175.396**	**Rp 28.550.741.036**	**Rp (17.254.565.640)**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas telah disetorkan ke Kas Negara dan disalurkan ke Kelompok tani dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp19.992.000,00 merupakan dana Banper yang masih ada di rekening kelompok tani sampai dengan 31 Desember 2018, namun telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 28 Maret 2019 dengan NTPN No. 000166L438RPFLS9 dan 8D0216LBLDF3PLS9.
2. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp18.000.000,00 merupakan dana pengembalian belanja 526 yang masih dipegang oleh bendahara satker dan lupa disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2018, namun telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 7 Februari 2019 dengan NTPN 677868DJF90S437P.
3. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada DInas Pertanian Provinsi Maluku merupakan saldo di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) per 31 Desember 2018 yang tidak disalurkan dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 7 Januari 2019 dengan NTPN FDC3409P19LVUSLP.
4. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan saldo di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018, dan telah disalurkan ke Kelompok Tani senilai Rp10.540.225.296,00 dan dikembalikan ke Kas Negara senilai Rp675.028.100,00 sehingga per 15 Februari 2019 saldo di rekening telah nihil.

Adapun monitoring saldo kas lainnya dan setara kas dapat dilihat pada Lampiran D (halaman 85)

C.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.739.206.731,00 dan Rp40.634.979,00. Piutang Bukan pajak per 31 Desember 2018 terdiri atas Piutang PNBP dan Piutang Lainnya, yaitu:

115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4,517,677,335.00
115212 Piutang Lainnya	39,221,529,396.00
Jumlah	43,739,206,731.00

Rincian Piutang PNBP adalah sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Jatuh Tempo
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251)	-	8,902,888	Non SKTM
		Mukhtarrudin	75,606,976	21 Agust 2009
129075	Distan TPH Kab. Lamsel	Ir. Supriyono	129,517,900	13 Maret 2008
159107	Dinas TPH Prov. Kalimantan Selatan	Riza Rosadi, SP	4,255,294,080	-
189132	Distan Prov. Sulteng	Ir. Ansaruddin, M.Si	2,819,400	16 Febr 2018
239071	Distan TPH Prov. NTB (239071)	-	21,691,091	Non SKTM
289104	Distan Prov. Maluku Utara	Djabir Ibrahim, SH., MH	11,925,000	14 Sept 2017
319063	Distan TP dan Perkebunan Kab. Gorontalo	Darwan Usman, SP., M.Si	8,302,500	4 Agust 2010
		Irham DJ. Maku	3,617,500	07 Juni 2016
Jumlah			**4,517,677,335**	

Sementara, rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Ket
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251)	-	32,609,196,695.00	Bank Garansi
189132	Distan Prov. Sulteng	-	842,059,238.00	Bank Garansi
199125	Distan TPH Prov. Sulsel	-	5,770,273,463.00	Bank Garansi
Jumlah			**39,221,529,396.00**	

Adapun perbandingan Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tampak pada **Tabel 24.**

Tabel 24. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Satker	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	238251 Ditjen Tanaman Pangan	32.693.706.559,00	8.902.888,00
2	109083 Dinas TPH Kab. Bungo	0,00	6.020.000,00
3	129075 Distan TPH Kab. Lampung Selatan	129.517.900,00	0,00
4	199125 Distan TPH Prov. Sulsel	5.770.273.463,00	0,00
5	189132 Distan Daerah Prov. Sulteng	844.878.638,00	0,00
6	239071 Distan TPH Prov. NTB	21.691.091,00	25.712.091,00
7	289104 Distan Prov. Maluku Utara	11.925.000,00	0,00
8	319063 Distan Bun Kab. Gorontalo	11.920.000,00	0,00
9	159107 Distan TPH Prop. Kalsel	4.255.294.080,00	0,00
	Total	**43.739.206.731,00**	**40.634.979,00**

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Adapun penjelasan Piutang PNBP pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

1. Piutang Satker Ditjen Tanaman Pangan merupakan piutang dari angsuran sewa rumah dinas, denda keterlambatan pada PT. Mariabe Sanmor, dan Bank Garansi Direktorat PPHTP atas belanja 526 bentuk barang.
2. Piutang Distan TPH Kab. Lampung Selatan merupakan temuan Itjen Kementan atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah, reklas dari akun Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan.
3. Piutang Distan TPH Prov. Sulawesi Selatan merupakan Bank Garansi atas kontrak kegiatan tahun 2018 yang telah diklaim oleh KPPN dan disetorkan ke Kas Negara.
4. Piutang Distan Daerah Prov. Sulawesi Tengah merupakan temuan Itjen Kementan atas denda keterlambatan pekerjaan pemerintah dan Bank Garansi atas kontrak kegiatan tahun 2018 yang telah diklaim oleh KPPN dan disetorkan ke Kas Negara.
5. Piutang Dinas TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil LHP BPK tahun 2016 atas PNBP berupa biaya sertifikasi, baik pengujian lapangan maupun pengujian laboratorium yang belum disetor ke Kas Negara.
6. Piutang PNBP pada Distan Prov. Maluku Utara merupakan temuan Itjen atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun 2017.
7. Piutang Distan Kabupaten Gorontalo merupakan temuan Itjen atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun 2008 dan 2009, dan reklas dari akun Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan
8. Piutang Distan Prov. Kalimantan Selatan merupakan hasil temuan itjen atas dana banper kegiatan Pajale tahun 2017 yang masih ada di rekening kelompok tani.

Mutasi piutang Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**40.634.979,00**
Mutasi Tambah:	**Rp**	**43.708.612.752,00**
Ditjen Tanaman Pangan	Rp	32.684.803.671,00
Distan TPH Kab. Lampung Selatan	Rp	129.517.900,00
Distan TPH Prov. Sulsel	Rp	5.770.273.463,00
Distan Daerah Prov. Sulteng	Rp	844.878.638,00
Distan Prov. Maluku Utara	Rp	11.925.000,00
Distan Bun Kab. Gorontalo	Rp	11.920.000,00
Distan TPH Prop. Kalsel	Rp	4.255.294.080,00
Mutasi Kurang:	**Rp**	**10.041.000,00**
- Setoran Piutang PNBP Kab. Bungo	Rp	6.020.000,00
- Setoran Piutang PNBP Prov. NTB	Rp	4.021.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**43.739.206.731,00**

Mutasi penambahan Piutang PNBP adalah sebesar Rp43.708.612.752,00, mutasi kurang adalah sebesar Rp10.041.000,00, yang merupakan setoran dari Kab. Bungo dan Prov. NTB.

C.5 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.775.500.693,00 dan Rp3.820.101.594,00.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Adapun Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 terdiri atas:

Akun	Uraian		Jumlah
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		3,385,803,875.
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		2,389,696,818.
	Jumlah	**Rp**	**5,775,500,693**

Tabel 25. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018

Satker		Debitur	Piutang	Jatuh Tempo
Kode	Nama			
238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Mukhtarrudin	27,200,000	26 Okt 2014
		2. Sutrisno, SP. M.Hum	3,000,000,000	25 Okt 2014
		3. Ir. Medy Pramady (PUPN)	91,753,000	29 Jan 2018
079124	Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	1. H. Suryadi 2. Sutino	164,492,500	24 Agust 2019
		Urip Fatah Toto Prasetyo	2,000,000,000	-
219055	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	1. Ir. Abubakar Marasabessy	182,600,000	Sept 2008
		2. Husein Salampesy, SP	32,350,000	28-Feb-08
		3. Ir. Ngatmin Syahrir	10,254,318	25 Nov 2007
299336	Dinas Pert. dan Peter. Prov. Banten	1. H. Asep Mulya Hidayat, SP. MM	8,900,000	25 Juni 2014
		2. Awan Ruswan, SP,M.Si	207,000,000	-
319088	Dinas Pertanian TPH Prov. Gorontalo	1. Ir. Asy'ari Hasiru 2. Jasin Mohammad, SE, MPA	4,750,000	26 Okt 2014
		1. Ir. Asy'ari Hasiru 2. Moch. Ridwan Nadjamuddin	32,299,400	25 Okt 2014
		Ir. Ramdan Pade, M.Si	13,901,475	29 Jan 2018
Jumlah			**5,775,500,693**	

Tabel 26. Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	30 September 2018	31 Desember 2017
1	Bagian Lancar TP	3,385,803,875.00	3,594,897,276.00
2	Bagian Lancar TGR	2,389,696,818.00	225,204,318.00
	Total	**5,775,500,693.00**	**3,820,101,594.00**

Sedangkan rekapitulasi mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**3,820,101,594.00**
Mutasi Tambah :		
- TP/TGR	Rp	2,187,644,200.00
Jumlah Penambahan	**Rp**	**2,187,644,200.00**
Mutasi Kurang		
- Pindah akun Piutang Bukan Pajak	Rp	217,044,876.00
- Setoran TP/TGR	Rp	15,200,225.00
Jumlah Pengurangan	**Rp**	**232,245,101.00**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**5,775,500,693.00**

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp2.164.492.500,00 merupakan penambahan TP/TGR dari Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara dan Rp23.151.700,00 dari Dinas Pertanian TPH Prov. Gorontalo
- Mutasi kurang Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp15.200.225,00 merupakan setoran dari:
  1. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten (299336.DK) Rp3.000.000,00.
  2. Dinas Pertanian TPH Provinsi Gorontalo (319088.TP) Rp9.250.225,00.
  3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gorontalo (319063.TP) Rp2.950.000,00.
- Mutasi Kurang Pindah akun ke Piutang Bukan Pajak sebesar Rp217.044.876,00 berasal dari
  1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan Rp129.517.900,00.
  2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gorontalo (319063.TP) Rp11.920.000,00.
  3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp75.606.976,00.

C.6 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp3.621.830.656,00) dan (Rp3.820.101.594,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Pada **Tabel 27** disajikan Perbandingan Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018.

Tabel 27. Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian Satker	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
	Piutang Bukan Pajak		
1	109083 Dinas TPH Kab. Bungo	0.00	(30,100.00)
2	238251 Ditjen Tanaman Pangan	(84,509,864.00)	(890,289.00)
3	239071 Distan TPH Prov. NTB	(108,455.00)	(128,561.00)
4	129075 Distan TPH Kab Lampung Selatan	(129,517,900.00)	0.00
5	159107 Distan TPH Prov. Kalsel	(21,276,470.00)	0.00
6	189132 Distan Daerah Prov. Sulteng	(14,097.00)	0.00
7	289104 Distan Prov. Maluku Utara	(11,925,000.00)	0.00
8	319063 Distan dan Bun Kab. Gorontalo	(11,920,000.00)	0.00
	Jumlah	**(259,271,786.00)**	**(1,048,950.00)**
	Bagian Lancar TP/TGR		
1	129075 Distan TPH Kab. Lampung Selatan	0.00	(129,517,900.00)
2	238251 Ditjen Tanaman Pangan	(3,118,953,000.00)	(3,194,559,976.00)
3	299336 Distanak Prov. Banten	(215,900,000.00)	(218,900,000.00)
4	319063 Distanbun Kab. Gorontalo	0.00	(14,870,000.00)
5	319088 Distan TPH Prov. Gorontalo	(50,950,875.00)	(37,049,400.00)
6	079124 Distan Prov. Sumatera Utara	(10,822,463.00)	0.00
7	219055 Distan Maluku	(225,204,318.00)	(225,204,318.00)
	Jumlah	**(3,621,830,656.00)**	**(3,820,101,594.00)**
	Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**(3,881,102,442.00)**	**(3,821,150,544.00)**

Adapun rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBP adalah:

No.	Uraian Satker	Kualitas		Nilai Piutang	Penyisihan		Nilai Penyisihan
1	Kantor Pusat	Macet	Rp	84,509,864	100%	Rp	(84,509,864)
2	Diperta Prov.Nusa Tenggara Barat	Lancar	Rp	21,691,091	0.50%	Rp	(108,455)
3	Distan TPH Kab. Lampung Selatan	Macet	Rp	129,517,900	100%	Rp	(129,517,900)
4	Distan TPH Prov. Kalsel	Lancar	Rp	4,255,294,080	0.50%	Rp	(21,276,470)
5	Distan Daerah Prov. Sulteng	Lancar	Rp	2,819,400	0.50%	Rp	(14,097)
6	Distan Prov. Maluku Utara	Macet	Rp	11,925,000	100%	Rp	(11,925,000)
7	Distan dan Bun Kab. Gorontalo	Macet	Rp	11,920,000	100%	Rp	(11,920,000)
	Jumlah		**Rp**	**4,517,677,335**		**Rp**	**(259,271,787)**

Sementara rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

No.	Uraian Satker	Kualitas		Nilai Piutang	Penyisihan		Nilai Penyisihan
1	Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara	Lancar	Rp	2,164,492,500	0.5%	Rp	(10,822,463)
3	Ditjen Tanaman Pangan	Macet	Rp	3,118,953,000	100%	Rp	(3,118,953,000)
4	Distannak Prov. Banten	Macet	Rp	215,900,000	100%	Rp	(215,900,000)
6	Distan TPH Prov. Gorontalo	Macet	Rp	50,950,875	100%	Rp	(50,950,875)
7	Distan Prov. Maluku	Macet	Rp	225,204,318	100%	Rp	(225,204,318)
	Jumlah		**Rp**	**5,775,500,693**		**Rp**	**(3,621,830,656)**

Tabel 28. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar TA 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak	**4,279,804,671**		
Lancar	4,279,804,571	0.50%	(21,399,023)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	237,872,764	100%	(237,872,764)
Jumlah	**4,517,677,335**		**(259,271,787)**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	2,164,492,500	0.50%	(10,822,462.50)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	3,611,008,193	100%	(3,611,008,193)
Jumlah	**5,775,500,693**		**(3,621,830,656)**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**10,293,178,028**		**(3,881,102,442)**

C.7 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.907.487.078,00 dan Rp8.050.919.658,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian jenis persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 seperti pada **Tabel 29** di bawah ini.

Tabel 29. Perbandingan Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Barang Konsumsi	120.937.595,00	394.283.664,00
Bahan untuk Pemeliharaan	13.332.500,00	52.711.680,00
Suku Cadang	89.972.000,00	56.863.750,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	3.466.794.983,00	7.330.610.564,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	216.450.000,00	216.450.000,00
Jumlah	**3.907.487.078,00**	**8.050.919.658,00**

Berdasarkan tabel diatas, berikut ini disajikan penjelasan per akun atas barang persediaan sebagai berikut:

a. Persediaan berupa barang konsumsi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp120.937.595,00 dan Rp394.283.664,00. Mutasi Persediaan barang konsumsi adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**394.283.664**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.943.416.823
Koreksi Tambah		
Hasil Opname Fisik	Rp	237.250
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	228.524.382
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**7.172.178.455**
Mutasi kurang:		
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	3.663.525
Pemakaian persediaan	Rp	7.441.860.999
Hasil Opname Fisik Lebih		
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**7.445.524.524**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**120.937.595**

b. Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp13.332.500,00 dan Rp52.711.680,00. Mutasi Persediaan berupa Bahan untuk Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**52.711.680**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	91.919.000
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	1.226.650
Koreksi tambah		
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**93.145.650**
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	132.524.830
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	-
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**132.524.830**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**13.332.500**

c. Persediaan berupa Suku Cadang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp89.972.000,00 dan Rp56.863.750,00. Mutasi Persediaan berupa Suku Cadang adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**56,863,750**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1,545,798,856
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**1,545,798,856**
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	1,508,656,549
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	4,034,057
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**1,512,690,606**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**89,972,000**

d. Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	3,827,156,858,703
Perolehan Lainnya	Rp	93,060,000
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	165,964,736
Reklas Masuk	Rp	3,936,195,900
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**3,831,352,079,339**
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	-
Penyerahan Kepada Masyarakat	Rp	3,829,383,981,389
Penyerahan Kepada Masyarakat Atau Pemda Tugas Pembantuan	Rp	-
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	1,968,097,950
Reklas Keluar	Rp	-
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**3,831,352,079,339**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**-**

e. Persediaan berupa Bahan Baku per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp3.466.794.983,00 dan Rp7.330.610.564,00. Mutasi Persediaan berupa Bahan Baku adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**7,330,610,564**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	2,618,165,908
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	1,942,965
Transfer Masuk	Rp	180,000,000
Koreksi tambah	Rp	-
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**2,800,108,873**
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	6,479,144,454
Transfer Keluar	Rp	180,000,000
Barang Rusak	Rp	4,780,000
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	-
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**6,663,924,454**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**3,466,794,983**

Nilai persediaan bahan baku per 31 Desember 2018 Rp3.466.794.983,00 berada pada 11 (sebelas) Satker seperti disajikan pada **Tabel 30** dibawah ini.

Tabel 30. Rincian Persediaan Bahan Baku per 31 Desember 2018

KDBAES1	KDSATKER	NAMA SATKER	Bahan Baku
01803	020072	Balai Besar Peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan Karawang Jabar	99.450
01803	059131	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Pasuruan	247.950.000
01803	089076	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Sumbar	247.078.800
01803	099271	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Prov. Riau	454.456.479
01803	149079	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Barito Selatan	163.800.000
01803	238251	Ditjen Tanaman Pangan	962.163.765
01803	239071	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Prov. Ntb	755,432,940
01803	259062	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. Papua	97.203.549
01803	299351	Dinas Pertanian Kab. Lebak	537.750.000
Grand Total			**3.466.794.983**

f. Persediaan berupa Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

g. Persediaan berupa Persediaan Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp216.450.000,00 dan Rp216.450.000,00. Mutasi Persediaan berupa Persediaan Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**216,450,000**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	192,103,800
Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	-
Koreksi Tambah	Rp	59,597,500
Total Mutasi Tambah	**Rp**	**251,701,300**
Mutasi kurang:		
Pemakaian	Rp	251,701,300
Penyesuaian Nilai Persediaan		
Penghapusan Lainnya		
Total Mutasi Kurang	**Rp**	**251,701,300**
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**216,450,000**

PIUTANG JANGKA PANJANG

C.8 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp9.042.914.825 dan Rp905.869.746,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Satker		Debitur	Piutang	Jatuh Tempo
Kode	Nama			
119129	Dinas Pertanian Prov. Sumatera Selatan	Suprianto	151,900,000	28 Juli 2019
129112	Dinas Pertanian TPH Prov. Lampung	Imam Mashuri, SE	8,331,546,860	-
139265	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau	RAMADHANI PATRIYA, SP	263,164,387	-
189032	Distan Daerah Prov. Sulawesi Tengah	Ir. Ansaruddin, M.Si	61,982,000	-
239126	Dinas Pertanian TPH Prov. NTB	Ir. Iswan Chaidir	12,734,828	24 Mei 2019
249158	Dinas Pertanian Prov. NTT	1. Fransiscus Fili, 2. Selviana Cundawan, SE 3. Dionisius Wea 4. Elim Melkissedek Nelle	134,287,500	25 Nov 2019
289104	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	Djabir Ibrahim	14,200,000	-
319171	Distanbun dan KP Kab. Pohuwato	Wady Van Gobel, SP Suyoto, S.TP Kurniawan	73,099,250	26 Okt 2014
J u m l a h			**9,042,914,825**	

Adapun perbandingan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dapat dilihat pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Satker	Jumlah Debitur	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
029159 Distan TP Prov. Jawa Barat	2	Rp	-	Rp	391,763,750
119129 Distan TPH Prop. Sumatera Selatan	1	Rp	151,900,000	Rp	-
129112 Distan TPH Prov. Lampung	2	Rp	8,331,546,860	Rp	-
139265 Distan Perikanan dan Nak Kab. Sanggau	1	Rp	263,164,387	Rp	-
189132 Distan Prov. Sulawesi Tengah	1	Rp	61,982,000	Rp	100,999,100
229099 Distan TP Prov. Bali	1	Rp	-	Rp	28,993,718
239126 Distan TPH Prov. NTB	1	Rp	12,734,828	Rp	24,726,428
249158 Distan Prov. NTT	4	Rp	134,287,500	Rp	285,787,500
289104 Distan Prov. Maluku Utara	2	Rp	14,200,000	Rp	-
319171 Distanbun dan KP Kab. Pohuwato	3	Rp	73,099,250	Rp	73,599,250
Jumlah	**18**	**Rp**	**9,042,914,825**	**Rp**	**905,869,746**

Sementara mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**905,869,746.00**
Mutasi tambah:		
Temuan TP/TGR	Rp	8,760,811,247.00
Mutasi kurang:		
Pelunasan/Setoran TP/TGR	Rp	623,766,168.00
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**9,042,914,825.00**

Mutasi tambah Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp8.760.811.247,00 merupakan input awal TP/TGR atas temuan Itjen Kementan yang terdapat pada:

1. Dinas Pertanian TPH Prov. Sumatera Selatan Rp151.900.000,00.
2. Dinas Pertanian TPH Prov. Lampung Rp8.331.546.860,00.
3. Distankannak Kab. Sanggau Rp263.164.387,00.

Mutasi kurang Tagihan TP/TGR sebesar Rp 623.766.168,00 merupakan setoran dari:

1. Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp391.763.750,00.
2. Satker Dinas Pertanian Daerah Prov. Sulawesi Tengah Sebesar Rp39.017.100,00.
3. Satker DInas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTB sebesar Rp11.991.600,00.
4. Satker Dinas Pertanian Provinsi NTT Sebesar Rp151.500.000,00.
5. Satker DInas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Bali sebesar Rp28.993.718,00.
6. Satker Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Pohuwato Sebesar Rp500.000,00.

Adapun terkait penjelasan dan data piutang, baik piutang bukan pajak dan Piutang TP/TGR terdapat pada Lampiran E (halaman 86)

C.9 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp132.077.328,00) dan (Rp77.760.597,00) Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 32. Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018

No	Satker	Wilayah	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	119129	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.	Lancar	151,900,000	0.50%	(759,500)
2	129112	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.	Lancar	8,331,546,860	0.50%	(41,657,734)
2	139265	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau	Lancar	263,164,387	0.50%	(1,315,822)
3	189132	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah	Lancar	61,982,000	0.50%	(309,910)
4	239126	Dinas Pertanian TPH Provinsi Nusa Tenggara Barat	Lancar	12,734,828	0.50%	(63,674)
5	249158	Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Lancar	134,287,500	0.50%	(671,438)
	289104	Dinas Pertanian Prov. Maluku Utara	Macet	14,200,000	100.00%	(14,200,000)
6	319171	Dinas Pertanian Perkebunan dan KP Kab. Pohuwato	Macet	73,099,250	100.00%	(73,099,250)
Jumlah				**9,042,914,825**		**(132,077,328)**

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing–masing sebesar Rp1.783.891.147.517,00 dan Rp1.251.244.180.373,00. **Tabel 33** menunjukkan Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Untuk data aset pada Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada Lampiran F (halaman 87).

Tabel 33. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan
1	Tanah	Rp 1.550.221.115.200	Rp 994.039.613.091	Rp 556.181.502.109
2	Peralatan dan Mesin	Rp 518.439.552.275	Rp 551.266.528.361	Rp (32.826.976.086)
3	Gedung dan Bangunan	Rp 161.507.869.265	Rp 157.482.593.804	Rp 4.025.275.461
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 11.719.799.171	Rp 20.747.540.611	Rp (9.027.741.440)
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.528.046.150	Rp 6.465.106.050	Rp (3.937.059.900)
	Jumlah	**Rp 2.244.416.382.061**	**Rp 1.730.001.381.917**	**Rp 514.415.000.144**
	Akumulasi Penyusutan	Rp 460.525.234.544	Rp 478.757.201.544	Rp 18.231.967.000
	Nilai Buku	Rp 1.783.891.147.517	Rp 1.251.244.180.373	Rp 532.646.967.144

C.10 TANAH

Tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing–masing sebesar Rp1.550.221.115.200,00 dan Rp994.039.613.091,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 31 Desember 2017	**Rp**	**994,039,613,091**
Mutasi Tambah :	Rp	0
Penambahan Saldo Awal	Rp	153,808,200,000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	405,211,894,090
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	2,838,591,981
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**1.550,221,115,200**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**1.550,221,115,200**

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Saldo Awal sebesar Rp153.808.200,00 berasal dari satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, merupakan aset tanah milik Kementerian Pertanian yang dipinjampakaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan dicatat serta diinput pada Aplikasi SIMAKBMN Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara (079076) berdasarkan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Penambahan Tanah dari transaksi Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp405.211.894.090,00 terdapat pada Satker BBPOPT Jatisari, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara sebagai akibat dari adanya Revaluasi Aset oleh KPKNL.

Adapun mutasi kurang Aset Tetap Tanah merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya sebesar Rp2.838.591.981 terdapat pada satker Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kab. Minahasa Utara dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Banggai.

Tabel 34. Rincian Nilai Aset Tanah per Satker per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Eselon 1	31 Desember 2018		31 Desember 2017		Kenaikan/ Penurunan	
1	Ditjen Tanaman Pangan	Rp	935,128,935,200	Rp	935,128,935,200	Rp	-
2	BBPPMBTPH Cimanggis	Rp	39,672,000,000	Rp	5,714,972,000	Rp	33,957,028,000
3	BBPOPT Jatisari	Rp	146,844,994,000	Rp	17,466,992,000	Rp	129,378,002,000
4	Kab. Minahasa Utara	Rp	-	Rp	234,795,000	Rp	(234,795,000)
5	Kab. Banggai	Rp	-	Rp	2,603,796,981	Rp	(2,603,796,981)
6	Distan Prov. Sulawesi Tenggara	Rp	340,000,000	Rp	340,000,000	Rp	-
7	Distan Prov. Bengkulu	Rp	5,293,733,000	Rp	5,293,733,000	Rp	-
8	Distan Prov. Sumatera Utara	Rp	422,941,453,000	Rp	27,256,388,910	Rp	395,685,064,090
	Jumlah	**Rp**	**1,550,221,115,200**	**Rp**	**994,039,613,091**	**Rp**	**556,181,502,109**

Berdasarkan tabel tersebut di atas kenaikan aset Tanah terbesar pada Satker Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara yang merupakan hasil Penambahan saldo awal dan hasil koreksi revaluasi aset tetap oleh KPKNL.

C.11 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp518.439.552.275,00 dan Rp551.266.528.361,00. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**Rp**	**551,266,528,361**
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	12,540,611,941
Transfer Masuk	Rp	693,272,200
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	747,077,649
Reklasifikasi Masuk	Rp	48,111,947
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	143,948,500
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	(26,330,073,377)
Penghapusan	Rp	0
Transfer Keluar	Rp	(693,272,200)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(25,671,947)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp	(153,948,500)
Usulan Barang Hibah DK/TP	Rp	(12,364,938,965)
Usulan Barang Hilang Ke Pengelola	Rp	(120,887,999)
Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola	Rp	(11,950,000)
Hibah Keluar	Rp	(7,299,255,335)
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**518,439,552,275**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2018	Rp	(446,445,536,979)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**71,994,015,296**

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Peralatan dan Mesin dari transaksi Pembelian sebesar Rp4.896.924.501,00 berasal dari 3 (tiga) satker, yaitu:

No	Satker	Nilai	
1	010082 BBPPMBTPH Cimanggis	Rp	518,760,728
2	020072 BBPOPT Jatisari	Rp	409,779,695
3	238251 Kantor Pusat	Rp	11,612,071,518
	Jumlah	**Rp**	**12,540,611,941**

2. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp693.272.200,00 berasal dari Satker BBPOPT Jatisari.

3. Terdapat Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp747.077.649,00 berasal dari 6 (enam) satker, yakni:

No	Satker		Nilai
1	059137 DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI	Rp	12,000,000
2	059477 DINAS PERTANIAN KAB. JOMBANG	Rp	11,800,000
3	199077 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	Rp	367,590,650
4	209078 DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA, PETERNAKAN KAB. KOLAKA	Rp	189,786,999
5	229067 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	Rp	34,500,000
6	319171 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. POHUWATO	Rp	131,400,000
	Jumlah	**Rp**	**747,077,649**

4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp 48.111.947,00 Berasal dari 2(dua) satker, yaitu:

No	Satker		Nilai
1	020072 BBPOPT Jatisari	Rp	22,440,000
2	199077 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat	Rp	25,671,947
	Jumlah	**Rp**	**48,111,947**

5. Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi Rp143.948.500,00 berasal dari 5(lima) satker yaitu:

No	Satker		Nilai
1	020072 BBPOPT Jatisari	Rp	32,941,000
2	069107 Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya	Rp	10,000,000
3	119129 Distan TPH PROP. Sumatera Selatan	Rp	21,842,500
4	169073 Distan TP Prov. Kalimantan Timur	Rp	24,040,000
5	339055 Distannak Ketahanan Pangan Prov. Papua Barat	Rp	55,125,000
	Jumlah	**Rp**	**143,948,500**

Penjelasan mengenai mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp26.330.073.377,00 berasal dari 39 (tiga puluh sembilan) Satker.
2. Transfer keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp693.272.200,00 berasal dari Satker Kantor Pusat.
3. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp153.948.500,00 berasal dari 6(enam) satker yaitu:

No	Satker	Nilai	
1	020072 BBPOPT Jatisari	Rp	(32,941,000)
2	069107 Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya	Rp	(10,000,000)
3	119129 Distan TPH PROP. Sumatera Selatan	Rp	(21,842,500)
4	139077 Distan TPH Prov. Kalimantan Barat	Rp	(10,000,000)
5	169073 Distan TP Prov. Kalimantan Timur	Rp	(24,040,000)
6	339055 Distannak Ketahanan Pangan Prov. Papua Barat	Rp	(55,125,000)
	Jumlah	**Rp**	**(153,948,500)**

4. Reklasifikasi Keluar Sebesar Rp25.671.947,00 Berasal dari Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
5. Usulan Barang Hibah DK/TP Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.364.938.965,00 yang berasal dari 15 Satker.
6. Usulan Barang Hilang Ke Pengelola sebesar Rp120.887.999,00 yang berasal dari satker Dinas Pertanian, Hortikultura, Peternakan Kab. Kolaka.
7. Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola sebesar Rp11.950.000,00 yang berasal dari satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa.
8. Hibah Keluar sebesar Rp7.299.255.335,00 berasal dari 6(enam) satker yaitu:

No	Satker	Nilai	
1	039130 Distan Kab. Sragen	Rp	(387,329,250)
2	089098 Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar	Rp	(39,615,000)
3	129076 Distan TPH Kab. Lampung Tengah	Rp	(51,577,275)
4	139077 Distan TPH Prov. Kalimantan Barat	Rp	(6,647,554,000)
5	159070 Distanbunnak kab. Banjar	Rp	(22,800,000)
6	319063 Distanbun Kab. Gorontalo	Rp	(150,379,810)
	Jumlah	**Rp**	**(7,299,255,335)**

C.12 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp161.507.869.265,00 dan Rp157.482.593.804,00. Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**157.482.593.804,00**
Mutasi tambah:	**Rp**	**42.254.060.505,00**
- Pembelian	Rp	1.034.850.000,00
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	2.298.438.580,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	513.115.500,00
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	2.572.000.000,00
- Reklas Masuk Hasil Inventarisasi	Rp	1.361.652.000,00
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	378.045.000,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	33.725.744.100,00
- Pengembangan melalui KDP	Rp	122.764.225,00
- Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	247.451.100,00
Mutasi kurang:	**Rp**	**38.228.785.044,00**
- Reklas Keluar Hasil Inventarisasi	Rp	1.361.652.000,00
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	4.809.898.385,00
- Penghapusan	Rp	-
- Usulan Barang Hibah DK/TP	Rp	13.196.764.750,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	4.716.365.389,00
- Hibah Keluar	Rp	347.451.000,00
- Koreksi Semu	Rp	13.796.653.520,00
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**161.507.869.265,00**
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2018	Rp	(12.106.822.936,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**149.401.046.329,00**

Penjelasan mengenai mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pembelian Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.034.850.000 berasal dari Satker BBPOPT Jatisari dan Kantor Pusat.
2. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi Pengembangan Nilai Aset senilai Rp2.210.648.580,00 yang berasal dari Kantor Pusat, dan Rp87.790.000,00 yang berasal dari BBPOPT Jatisari
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp513.115.500,00 yang berasal dari BBPOPT Jatisari
4. Penerimaan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.572.000.000,00 yang berasal dari BBPOPT Jatisari.
5. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi sebesar Rp1.361.652.000,00 yang berasal dari Dinas Pertanian Prov. Papua
6. Barang Berlebih hasil Inventarisasi sebesar Rp378.045.000,00 yang berasal dari BBPPMBTPH Cimanggis.

7. Penambahan Gedung dan Bangunan dari transaksi Koreksi Tambah Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp33.725.744.10,00 berasal dari 18 (delapan belas) Satker.
8. Pengembangan melalui KDP Rp122.764.225,00 berasal dari BBPPMBTPH Cimanggis.
9. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp247.451.100,00 berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat

Adapun penjelasan mengenai mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi sebesar Rp1.361.652.000,00 yang berasal dari Dinas Pertanian Prov. Papua.
2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp4.809.898.385,00 yang berasal dari 24 (dua puluh empat) satker.
3. Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp13.196.764.750,00 yang berasal dari 10 (sepuluh) Satker, yakni:

No	Kode Satker	Nilai
1	029102 Dinas Pertanian TP Prov. Jawa Barat	(2,310,613,000)
2	029159 Dinas Pertanian TP Prov. Jawa Barat	(1,980,693,000)
3	209075 Dinas Pertanian Kab. Muna	(343,847,000)
4	209080 Distannak Kab. Konawe Selatan	(39,850,000)
5	249099 Dinas Pertanian Prov. Nusa Tenggara Timur	(4,126,038,000)
6	249121 Distan TPH kab. Sumba Timur	(47,405,000)
7	269078 Distankan Kab. Rejang Lebong	(1,283,126,000)
8	269088 Distankan Kab. Lebong	(99,500,000)
9	319071 Distanbun KP dan Nak Kab. Bone Bolango	(193,676,750)
10	319171 Distanbun dan Ketahanan Pangan Kab. Pohuwato	(2,772,016,000)
	Jumlah	**(13,196,764,750.)**

4. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-), terdapat pada Satker:

No	Kode Satker	Nilai
1	020072 BBPOPT Jatisari	(3,598,556,258)
2	029109 Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang	(117,572,580)
3	079076 Dinas Pertanian Prov. Sumatera Utara	(237,595,533)
4	099314 Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Riau	(410,790,945)
5	119087 Dinas TPH Kab. Muara Enim	(12,371,131)
6	149076 Dinas Pertanian Kab. Kapuas	(11,276,935)
7	169079 Dinas Pertanian Kab. Bulungan	(111,881,728)
8	219055 Dinas Pertanian Prov. Maluku	(216,320,279)
	Jumlah	**(4,716,365,389.)**

5. Hibah Keluar Sebesar Rp347.451.000,00 terdapat pada satker Dinas Pertanian Kab. Sragen Rp249.762.000,00 dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Muara Enim Rp97.689.000,00.

6. Koreksi Semu Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.218.710.626,00 terdapat pada 22 (dua puluh dua) Satker.

C.13 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.719.799.171,00 dan Rp20.747.540.611,00. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**20.747.540.611,00**
Mutasi tambah:	**Rp**	**2.283.577.602,00**
- Transfer Masuk	Rp	-
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	939.283.000,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	919.345.702,00
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp	14.055.000,00
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	268.056.500,00
- Pengembangan Nilai Aset	Rp	142.837.400,00
Mutasi kurang:	**Rp**	**11.311.319.042,00**
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	8.346.773.717,00
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	149.014.970,00
- Penghapusan	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	22.440.000,00
- Usulan Barang Hibah DK/TP	Rp	1.244.024.000,00
- Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	-
- Koreksi Pencatatan	Rp	228.238.000,00
- Koreksi Semu	Rp	762.596.355,00
- Hibah Keluar	Rp	558.232.000,00
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**11.719.799.171,00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	Rp	(1.969.874.629,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**9.749.924.542,00**

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp939.283.000,00 berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Ketapang.
2. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset sebesar Rp919.345.702,00, terdapat pada 7 Satker.
3. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp14.055.000,00 berasal dari Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Utara.
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp268.056.500,00 yang berasal dari BBPOPT Jatisari

5. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp142.837.400,00 yang berasal dari BBPPMBTPH Cimanggis

Adapun mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp8.346.773.717,00 berasal dari 27 (dua puluh tujuh) Satker.
2. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp137.745.934,00 yang berasal Satker BPOPT Jatisari dan Rp11.269.036,00 berasal dari Dinas Pertanian Prov. Kalimantan Tengah.
3. Reklasifikasi Keluar Sebesar Rp22.440.000,00 berasal dari BBPOPT Jatisari.
4. Usulan Barang Hibah DK/TP sebesar Rp1.244.024.000 berasal dari 6 (enam) satker yakni:

No	Kode Satker	Nilai
1	139301 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Ketapang	(939,283,000.00)
2	269078 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. REJANG LEBONG	(140,400,000.00)
3	319171 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. POHUWATO	(44,961,000.00)
4	059151 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PONOROGO	(39,380,000.00)
5	059568 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TULUNG AGUNG	(40,000,000.00)
6	209080 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN	(40,000,000.00)
	Jumlah	**(1,244,024,000.00)**

5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp228.238.000,00 berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan
6. Mutasi kurang aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp762.596.355,00 dari Koreksi Semu terdapat pada 9 (Sembilan) Satker.
7. Hibah Keluar sebesar Rp558.232.000,00 berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Rp468.630.000,00 dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar Rp89.602.000,00.

C.14 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.528.046.150,00 dan Rp6.465.106.050,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**6,465,106,050.00**
Mutasi tambah:	**Rp**	**2,489,100.00**
- Pembelian	Rp	2,489,100.00
- Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi kurang:	**Rp**	**3,939,549,000.00**
- Reklasifikasi Keluar	Rp	2,572,000,000.00
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	1,367,549,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**2,528,046,150.00**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember2018	Rp	(3,000,000.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**2,525,046,150.00**

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya berasal dari transaksi Pembelian sebesar Rp2.489.100,00 yang terdapat pada satker BPOPT Jatisari

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya berasal dari transaksi

1. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.572.000.000,00 yang terdapat pada satker BPOPT Jatisari.

2. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp1.367.549.000,00 yang terdapat pada satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat sebesar Rp1.336.549.000,00 dan satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp31.000.000,00

C.15 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

C.16 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp460.525.234.544,00) dan (Rp478.757.201.544,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Tabel 35**.

Tabel 35 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 1.550.221.115.200	Rp -	Rp 1.550.221.115.200
2	Peralatan dan Mesin	Rp 518.439.552.275	Rp 446.445.536.979	Rp 71.994.015.296
4	Gedung dan Bangunan	Rp 161.507.869.265	Rp 12.106.822.936	Rp 149.401.046.329
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 11.719.799.171	Rp 1.969.874.629	Rp 9.749.924.542
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.528.046.150	Rp 3.000.000	Rp 2.525.046.150
	Jumlah	**Rp 2.244.416.382.061**	**Rp 460.525.234.544**	**Rp 1.783.891.147.517**

ASET LAINNYA

C.17 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp810.523.275,00 dan Rp853.073.275,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 tampak pada **Tabel 36**.

Tabel 36. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018

No	Uraian	Nilai
1	Softw are	Rp 579,227,675
2	Aset Tak Berw ujud Lainnya	Rp 231,295,600
	Jumlah	**Rp 810,523,275**

Tabel 37. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	029102 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	Rp 299,800,000	Rp 299,800,000
2	238251 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	Rp 510,723,275	Rp 553,273,275
	Jumlah	Rp 810,523,275	Rp 853,073,275

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**853,073,275**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Penambahan Saldo Awal	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	42,550,000
Saldo per 31 Desember2018	**Rp**	**810,523,275**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember2018	Rp	(576,763,840)
Nilai Buku per 31 Desember2018	**Rp**	**233,759,435**

C.18 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp58.808.505.504,00 dan Rp27.474.850.202,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tampak pada **Tabel 38**.

Tabel 38. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Akun	31 Desember 2018	31 Desember 2017
166112	Rp 58,418,978,821	Rp 27,125,657,124
166113	Rp 389,526,683	Rp 349,193,078
Jumlah	**Rp 58,808,505,504**	**Rp 27,474,850,202**

Rincian Aset Lain-Lain per Satker per 31 Desember 2018, yaitu:

a) Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

No	Kode Satker	Uraian Satker	31 Desember 2018
1	018.03.010082	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN &	408,540,600.
2	018.03.020072	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG	498,594,991.
3	018.03.029102	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	1,716,559,000.
4	018.03.029109	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG	405,772,350.
5	018.03.029115	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB SUMEDANG	568,384,000.
6	018.03.039151	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	168,500,000.
7	018.03.049059	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	260,053,600.
8	018.03.059129	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB MALANG	293,102,250.
9	018.03.059134	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG	52,000,000.
10	018.03.059137	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI	39,861,250.
11	018.03.059147	DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGAWI	39,914,875.
12	018.03.059458	DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO	33,100,000.
13	018.03.059533	DINAS PERTANIAN KABUPATEN JEMBER	61,951,260.
14	018.03.069093	DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KAB ACEH TIMUR	40,000,000.
15	018.03.079076	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	724,703,500.
16	018.03.079079	DINAS PERTANIAN KAB. DELI SERDANG	39,820,000.
17	018.03.079096	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	39,000,000.
18	018.03.089076	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	281,408,185.
19	018.03.099314	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	74,710,000.
20	018.03.109065	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	717,943,300.
21	018.03.109119	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	39,900,000.
22	018.03.109218	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KAB. BATANGHARI	35,143,000.
23	018.03.109244	DINAS PERTANIAN KAB. SAROLANGUN	198,607,860.
24	018.03.119072	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA	16,036,608,544.
25	018.03.119086	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN OGAN	1,045,995,000.
26	018.03.119094	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. OKI	1,121,246,100.
27	018.03.119099	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN OKU TIMUR	217,389,400.
28	018.03.119129	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA	48,645,000.
29	018.03.129065	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG	15,988,000.
30	018.03.129075	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG	23,163,636.
31	018.03.129086	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN & PERIKANAN KABUPATEN WAY KANAN	40,000,000.
32	018.03.139077	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN	4,855,764,473.
33	018.03.139125	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN	71,831,000.
34	018.03.149065	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11,050,000.
35	018.03.149076	Dinas Pertanian Kab. Kapuas	1,943,538,000.
36	018.03.149092	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PULANG PISAU	830,957,740.
37	018.03.169073	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	699,000.
38	018.03.169090	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUTAI	124,550,000.
39	018.03.179066	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	109,118,000.
40	018.03.179077	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB. MINAHASA UTARA	234,795,000.
41	018.03.179103	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	846,664,500.
42	018.03.189086	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN POSO	85,000,000.
43	018.03.189097	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANGGAI	2,603,796,981.
44	018.03.189109	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB.	479,385,000.
45	018.03.199077	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI	10,008,834,993.
46	018.03.209069	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	8,737,000.
47	018.03.219055	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	32,337,000.
48	018.03.229067	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	146,968,000.
49	018.03.238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	1,244,930,848.
50	018.03.239071	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROV NUSA TENGGARA	1,028,496,000.
51	018.03.239084	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1,853,437,600.
52	018.03.239093	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA	312,083,000.
53	018.03.239305	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KOTA BIMA	97,950,000.
54	018.03.249099	DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	315,334,390.
55	018.03.249100	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUPANG	290,611,000.
56	018.03.249101	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KAB. BELU	241,633,000.
57	018.03.249113	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ENDE	139,900,000.
58	018.03.249121	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SUMBA	183,450,025.
59	018.03.249125	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBA BARAT	273,750,025.
60	018.03.269077	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	172,093,000.
61	018.03.269078	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. REJANG LEBONG	1,650,542,500.
62	018.03.269085	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUKO-MUKO	137,725,000.
63	018.03.269089	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KEPAHIANG	39,850,000.
64	018.03.289077	DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA	49,535,500.
65	018.03.299350	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PANDEGLANG	37,500,000.
66	018.03.299351	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LEBAK	39,930,000.
67	018.03.309150	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANGKA	40,490,000.
68	018.03.329054	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	57,440,000.
69	018.03.339055	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	4,750,000.
70	018.03.339060	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MANOKWARI	1,093,445,000.
71	018.03.339065	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SORONG SELATAN	176,215,000.
72	018.03.339183	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SORONG	928,550,000.
73	018.03.339195	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN RAJA AMPAT	210,250,000.
74	018.03.339206	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TELUK WONDAMA	60,500,000.
75	018.03.340412	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. POLEWALI MANDAR	57,954,545.
		JUMLAH	58,418,978,821.

b) Rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

No	Kode Satker	Uraian Satker	31 Desember 2018
1	059117	DISTANBUNNAK KABUPATEN SIDOARJO	2,216,395.
2	139077	DISTAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	22,163,950.
3	139098	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. KUBU RAYA	2,216,395.
4	149065	DISTANNAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4,432,790.
5	149076	DIINAS PERTANIAN KABUPATEN KAPUAS	2,216,395.
6	149077	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA	2,216,395.
7	149079	DISTANBUN KABUPATEN BARITO SELATAN	2,216,395.
8	159062	DISTAN TPH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	3,936,619.
9	179066	DISTANNAK PROVINSI SULAWESI UTARA	2,817,500.
10	179080	DISTANNAK KAB. MINAHASA TENGGARA	2,216,395.
11	179293	DISTANNAK KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,216,395.
12	199077	DISTAN TPH PROVINSI SULAWESI SELATAN	6,649,185.
13	229067	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	19,947,555.
14	229213	DISTANBUNHUT KAB BADUNG	2,216,395.
15	238251	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	310,127,700.
16	239265	DISTAN TPH KABUPATEN BIMA	1,720,224.
Jumlah			**389,526,683.**

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**Rp**	**27,474,850,202**
Mutasi Tambah :	**Rp**	**43,735,436,460**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	43,735,436,460
Mutasi Kurang :	**Rp**	**12,401,781,158**
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	1,933,811,749
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	-
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	5,144,148,213
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	Rp	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	3,196,046,751
Usulan Barang Hilang ke pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	1,103,522,050
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	304,311,000
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	Rp	717,725,000
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp	2,216,395
Saldo per 31 Desember 2018	**Rp**	**58,808,505,504**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2018	-Rp	43,179,498,154
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**Rp**	**15,629,007,350**

Mutasi tambah berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp43.735.436.460,00 terdapat pada 58 satker.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.933.811.749,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Nilai
1	059137 DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI	(12,000,000.)
2	059477 DISTAN KAB. JOMBANG	(11,800,000.)
3	089076 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(247,451,100.)
4	139301 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG	(939,283,000.)
5	199077 DISTAN TPH PROV. SULAWESI SELATAN	(367,590,650.)
6	209078 DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA	(189,786,999.)
7	229067 DISTAN PROV. BALI	(34,500,000.)
8	319171 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. POHUWATO	(131,400,000.)
	Jumlah	**(1,933,811,749.)**

2. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp5.144.148.213,00 terdapat pada satker:

No	Kode Satker	Nilai
1	238251 KANTOR PUSAT	-Rp 4,961,511,849
2	299350 Dinas Pertanian dan Peternakan KAB. Pandeglang	-Rp 182,636,364
	Jumlah	**-Rp 5,144,148,213**

3. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp3.196.046.751,00 berasal dari 5 (lima) Satker, yaitu:

No	Kode Satker	Nilai
1	010082 BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA DKI JAKARTA	(300,216,750.)
2	029102 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	(1,646,898,000.)
3	029159 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	(693,780,800.)
4	069091 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB ACEH UTARA	(135,410,000.)
5	238251 Kantor Pusat	(419,741,201.)
	Jumlah	**-Rp 3,196,046,751**

4. Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp1.016.198.050,00 yang berasal dari 3 (tiga) Satker, yaitu :

No	Kode Satker	Nilai
1	029159 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	(169,993,750.)
2	209078 DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA	(499,225,000.)
3	209080 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN	(346,979,300.)
	Jumlah	**(1,016,198,050)**

5. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp304.311.000,00 yang berasal dari 3 (tiga) Satker, yaitu :

No	Kode Satker	Nilai
1	059477 DINAS PERTANIAN KAB. JOMBANG	(183,375,000.)
2	119087 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. MUARA ENIM	(99,471,000.)
3	129076 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	(21,465,000.)
	Jumlah	**(304,311,000)**

6. Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp717.725.000,00 yang berasal dari 2 (dua) Satker, yaitu :

No	Kode Satker	Nilai
1	139077 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(708,200,000.)
2	179103 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(9,525,000.)
	Jumlah	**(717,725,000)**

7. Koreksi Pencatatan (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp2.216.395,00 berasal dari satker Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bolaang Mongondow Utara

C.19 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.756.261.994,00 dan Rp25.594.259.119,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada **Tabel 39**.

Tabel 39. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	**Aset Tak Berwujud**			
1	Software	Rp 579,227,675	Rp 576,763,840	Rp 2,463,835
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 231,295,600	Rp -	Rp 231,295,600
Jumlah		**Rp 810,523,275**	**Rp 576,763,840**	**Rp 233,759,435**
B	**Aset Lain-Lain**			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 58,418,978,821	Rp 42,952,575,066	Rp 15,466,403,755
2	Aset Tak Berjuwud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp 389,526,683	Rp 226,923,088	Rp 162,603,595
3	Aset Lainnya yang Belum Diregister		Rp -	Rp -
Jumlah		**Rp 58,808,505,504**	**Rp 43,179,498,154**	**Rp 15,629,007,350**
Total		**Rp 59,619,028,779**	**Rp 43,756,261,994**	**Rp 15,862,766,785**

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp51.484.469.126,00 dan Rp23.900.592.280,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan pada **Tabel 40**.

Tabel 40. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	51,403,193,126.00	23,423,224,480.00
Pendapatan Diterima Dimuka	35,000,000.00	0.00
Uang Muka Dari KPPN	46,276,000.00	477,367,800.00
Jumlah	**51,484,469,126.00**	**23,900,592,280.00**

C.20 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp51.403.193.126,00 dan Rp23.423.224.480,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, utang kepada pihak ketiga terdiri atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar.

Perbandingan dan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Tabel 41** dan **Tabel 42**.

Tabel 41. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp	51,176,267,258.00	Rp	159,191,980.00
2	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp	-	Rp	23,264,032,500.00
3	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp	226,925,868.00	Rp	-
Total		**Rp**	**51,403,193,126.00**	**Rp**	**23,423,224,480.00**

Tabel 42. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
1	Tagihan Listrik dan Telepon Bulan Desember Satker Kantor Pusat	Rp	165,944,063.00	Rp	159,191,980.00
2	Saldo di Rekening Penampung Lainnya (RPL) per 31 Desember 2017 pada Distannak Prov. Sulut (179103.TP) yang disalurkan ke Kelompok Tani pada Tahun 2018	Rp	-	Rp	23,264,032,500.00
3	Tunda Bayar Kantor Pusat dan Prov. Jawa Timur	Rp	51,010,323,195.00		
4	Kurang Bayar Belanja Pegawai	Rp	226,925,868.00		
Jumlah		**Rp**	**51,403,193,126.00**	**Rp**	**23,423,224,480.00**

C.21 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp35.000.000,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh instansi namun belum sepenuhnya menjadi hak instansi yang bersangkutan karena masih ada kewajiban yang masih harus dipenuhi dalam periode yang akan datang.

C.22 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp46.276.000,00 dan Rp477.367.800,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.23 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.818.063.826.129,00 dan Rp1.268.023.976.123,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp8.870.706.919,00 dan Rp11.140.821.147,00. Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 43. Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	3.431.491.550	3.181.202.605	7,87
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	82.668.200	33.057.200	150,08
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	1.538.012.386	0	0,00
Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	785.196.118	0	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	1.260.000	0	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	3.326.364.313	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	353.084.000	0	0,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	305.952.610	147.689.984	107,16
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesian Pekerjaan	2.356.600.155	4.291.060.541	-45,08
Pendapatan Anggaran Lain-lain	16.441.900	158.446.504	-89,62
Pendapatan Hak dan Perijinan	0	1.650.000	-100,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1.350.000	-100,00
Jumlah	8.870.706.919	11.140.821.147	-20,38

Pendapatan di atas merupakan setoran ke Kas Negara atas pelaksanaan kegiatan dari Bulan Januari – Desember 2018. Dari Tabel tersebut dapat dilihat realisasi pendapatan terbesar per 31 Desember 2018 adalah Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, nail sebesar 7,87% dibandingkan 31 Desember 2017. Berbeda dengan Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan yang meningkat 150,08% atau menjadi Rp82.668.200,00 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp33.057.200,00. Selain itu, pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) juga mengalami kenaikan sebesar 107,16% dibandingkan 31 Desember 2017, dari Rp147.689.984,00 menjadi Rp305.952.610,00.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp43.723.241.357,00 dan Rp44.613.818.782,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 44. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31-Dec-18	31-Dec-17	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	31,685,453,090	33,107,011,850	-4,49
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(13,249,698)	(4,646,060)	64,93
Beban Pembulatan Gaji PNS	461,879	440,484	4,63
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-4,296	(1,065)	75,21
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,356,451,512	2,295,735,290	2,58
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-832,734	(465,606)	44,09
Beban Tunj. Anak PNS	696,587,397	662,763,424	4,86
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	-333,093	0	100,00
Beban Tunj. Struktural PNS	1,334,025,000	1,208,300,000	9,42
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(2,220,000)	(33,810,000)	-1422,97
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,165,430,000	1,022,725,000	12,24
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(8,330,000)	(5,975,216)	28,27
Beban Tunj. PPh PNS	89,291,640	77,158,281	13,59
Beban Tunj. Beras PNS	1,724,457,020	1,815,859,080	-5,30
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(1,730,060)	(289,680)	83,26
Beban Uang Makan PNS	3,498,386,500	3,299,488,000	5,69
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(8,926,800)	0	100,00
Beban Tunjangan Umum PNS	1,175,065,000	1,173,680,000	0,12
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(2,185,000)	(4,155,000)	-90,16
Beban Uang Lembur	35,444,000	0	100,00
JUMLAH	**43,723,241,357**	**44,613,818,782**	-2,04

Secara garis besar, beban pagawai per 31 Desember 2018 mengalami penurunan dibandingkan periode 31 Desember 2017 sebesar 2,04%. Hal ini disebabkan adanya pengurangan jumlah pegawai karena mutasi, pensiun atau meninggal dunia.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.235.785.363,00 dan

Rp19.552.439.105,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	7.437.423.749	12,410,447,874	(66.86)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	1,200,000	0	100.00
Beban Persediaan bahan baku	6,479,144,454	6,784,102,076	(4.71)
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/Berjaga-jaga	0	183,187,030	(100.00)
Beban Persediaan Lainnya	318,017,160	174,702,125	45.07
JUMLAH	**14,235,785,363**	**19,552,439,105**	**(37.35)**

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp243.306.863.264,00 dan Rp243.181.523.667,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	8,386,857,453	7,173,011,804	16.92
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	(42,112)	(100.00)
Beban Penambah daya tahan Tubuh	473,347,100	427,700,350	10.67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	198,463,924	464,228,772	(57.25)
Beban Honor Operasional Satker	27,457,115,990	28,171,940,000	(2.54)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satker	(10,550,000)	(20,000)	52,650.00
Beban Barang Operasional Lainnya	1,893,067,900	759,244,870	149.34
Beban Bahan	45,515,001,108	59,762,588,164	(23.84)
Pengembalian Beban Bahan	(3,230,000)	(390,310)	727.55
Beban honor Output kegiatan	79,900,811,040	72,738,132,000	9.85
Pengembalian Beban honor Output kegiatan	(129,350,000)	(2,925,000)	4,322.22
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24,616,146,546	31,423,304,688	(21.66)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(12,900,000)	(10,363,490)	24.48
Beban Langganan Listrik	2,425,851,374	2,146,098,321	13.04
Beban Langganan Telepon	191,780,860	165,468,243	15.90
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	447,535,399	551,115,975	(18.79)
Beban Jasa Pos dan Giro	29,782,700	59,733,650	(50.14)
Beban Jasa Konsultan	3,280,613,103	4,180,542,650	(21.53)
Beban Sewa	5,422,844,150	5,002,269,450	8.41
Pengembalian Beban Sewa	0	(332,500)	(100.00)
Beban Jasa Profesi	15,908,026,000	12,691,095,000	25.35
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(25,015,000)	(250,000)	9,906.00
Beban Jasa Lainnya	27,358,665,117	17,510,394,292	56.24
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(33,000,000)	(31,021,150)	6.38
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	14,998,500	-	0.00

Jika dibandingkan dengan TA 2017, terdapat Kenaikan atas beban barang dan jasa sebesar 0,05%. Kenaikan beban barang dan jasa terbesar terdapat pada Beban Barang Operasional lainnya, Beban Jasa Lainnya dan Beban Jasa Profesi. Sementara nilai beban terbesar terdapat pada Beban Honor Output Kegiatan dikarenakan adanya beban pembayaran honor para Mantri Tani di Satker Dekonsentrasi di masing-masing provinsi.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.975.095.836,00 dan Rp13.792.827.086,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 47. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,125,615,171.	5,556,880,232.	10.23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,000,000.	109,988,000.	(95.45)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,664,374,536.	5,262,006,921.	(11.36)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan Pelumas Khusus Non Pertamina	17,999,250.	11,899,800.	51.26
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	424,701,500.	672,087,000.	(36.81)
Beban Pemeliharaan Lainnya	96,224,000.	-	100.00
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	132,524,830.	334,442,613.	(60.37)
Beban Persediaan Suku Cadang	1,508,656,549.	1,845,522,520.	(18.25)
Jumlah	**12,975,095,836**	**13,792,827,086**	**(5.93)**

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp217.854.579.793,00 dan Rp193.464.499.170,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	161,298,653,281.	125,887,952,056	28.13
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-426,168,025.	(207,763,231)	105.12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,741,668,599.	23,855,146,721	(46.59)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-1,730,000.	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,400,910,874.	18,832,262,635	(34.15)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-78,025,000.	-	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	32,034,209,240.	24,776,298,669	29.29
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-326,813,916.	(40,122,300)	714.54
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	265,413,440.	504,042,000	(47.34)
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	-53,538,700.	(143,317,380)	(62.64)
Jumlah	**217,854,579,793**	**193,464,499,170**	**12.61**

Jika dibandingkan dengan TA 2017, terdapat kenaikan atas beban Perjalanan Dinas sebesar 12,61%. Kenaikan terbesar pada Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan

Beban Perjalanan Biasa, yang disebabkan tingginya mobilitas pegawai teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi, terutama pada kegiatan Banpem (Belanja 526).

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.562.430.507.890,00 dan Rp5.221.990.026.239,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 61.107.309.218	Rp 19.386.599.860	215,20
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 1.557.419.363.946	Rp 1.409.493.574.200	10,49
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp -	Rp 500.000.000	-100,00
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 900.977.072.733	Rp 790.923.140.865	13,91
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	Rp -	Rp 175.000.000	-100,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	Rp 14.640.273.808	Rp 7.961.088.000	83,90
Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang	Rp 237.279.825.726	Rp 12.919.195.250	1.736,65
Pengembalian Beban Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang	-Rp 1.468.044.255	Rp -	100,00
Beban Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda dalam bentuk Uang	Rp 3.860.337.677	Rp -	100,00
Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Masy/Pemda	Rp -	Rp 49.027.000	-100,00
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang	Rp 1.270.289.145.181	Rp 1.598.763.918.623	-20,55
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	Rp 1.582.068.211.010	Rp 1.383.089.659.141	14,39
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-Rp 63.742.987.154	-Rp 1.271.176.700	4.914,49
Jumlah	**Rp 5.562.430.507.890**	**Rp 5.221.990.026.239**	**6,52**

Jika dibandingkan dengan TA 2017, terdapat kenaikan atas Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar 6,52%. Hal ini dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah pusat

Jika dibandingkan dengan TA 2017, terdapat kenaikan atas Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar 6,52%. Hal ini dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan bantuan pemerintah berupa sarana maupun prasarana yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian.

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban atas penyerahan bantuan pemerintah berupa barang. Mekanisme penyerahan persediaan yang diserahkan ke masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/PL.200/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp45.912.957.897,00 dan Rp44.421.455.939,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 50. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36,656,526,129.	37,939,674,486.	(3.38)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,457,142,739.	5,708,555,502.	48.15
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	136,443,896.	492,977,106	(72.32)
Beban Penyusutan Irigasi	241,552,811.	-	100.00
Beban Penyusutan Jaringan	56,729,049.	93,894,846.	(39.58)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	363,331,353.	156,997,079.	131.43
Jumlah Penyusutan	**Rp 45,911,725,977**	**Rp 44,392,099,019**	3.42
Beban Amortisasi Software	1,231,920.	29,356,920.	(95.80)
Jumlah Amortisasi	**Rp 1,231,920**	**Rp 29,356,920**	(95.80)
Jumlah	**Rp 45,912,957,897**	**Rp 44,421,455,939**	**3.36**

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp136.943.854,00 dan Rp86.518.189,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 51. Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% NAIK/TURUN
Beban Penyisihan Piutang PNBP	47.183.863	(32.011)	-147.498,90
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	35.429.163	83.753.000	-57,70
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	54.330.828	2.797.409	1.842,18
TOTAL	**136.943.854**	**86.518.398**	**58,28**

Jika dibandingkan dengan TA 2017, terdapat kenaikan atas beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar 58,28%, yang disebabkan bertambahnya nilai piutang, baik piutang PNBP, bagian lancar TP/TGR, maupun piutang tagihan TP/TGR sejumlah Rp46.359.745.274,00 karena banyaknya temuan terkait pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah (Belanja 526).

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK/TURUN
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-18.599.647.056	-3.797.509.135	389,79%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	67.327.600	49.250.000	36,71%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	18.666.974.656	3.846.759.135	385,26%
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132.879.742.049	41.618.472.003	219,28%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	137.021.838.577	142.862.384.913	-4,09%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.142.096.528	101.243.912.910	-95,91%
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**114.280.094.993**	**37.820.962.868**	**202,16%**

Pendapatan pelepasan aset non lancar berasal dari pendapatan penjualan peralatan dan mesin pada kantor pusat 018.03.238251.

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.268.023.976.123,00 dan Rp(200.668.581.428,00).

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp(6.017.425.173.342,00) dan Rp(5.732.141.324.371,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir periode tahun berjalan. Saldo Penyesuaian Nilai Aset periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp434.991.603.533,00 dan Rp822.584.352.894,00. Selisih revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi oleh KPKNL atas aset-aset pada Kementerian Pertanian Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per jenis sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2018

URAIAN	Koreksi Penilaian Tambah	Koreksi Penilaian Kurang	Selisih
Tanah	405,211,894,090	-	405,211,894,090.00
Gedung dan Bangunan	33,725,744,100	4,716,365,389	29,009,378,711.00
Jalan Jembatan Irigasi Jaringan	919,345,702	149,014,970	770,330,732.00
TOTAL	**439,856,983,892**	**4,865,380,359**	**434,991,603,533**

Adapun satker dengan saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

KODE	NMSATKER	RPHREAL
018.03.010082	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	(37,136,330,826.)
018.03.020072	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG JABAR	(125,641,699,808.)
018.03.029102	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	(1,511,124,932.)
018.03.029109	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARAWANG	117,572,580.
018.03.039130	DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN	(18,936,600.)
018.03.069392	DINAS PERTANIAN PROVINSI ACEH	(45,735,434.)
018.03.079076	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(241,675,073,517.)
018.03.089076	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(2,528,695,212.)
018.03.099271	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	(21,769,832.)
018.03.099314	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU	410,790,945.
018.03.119087	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. MUARA ENIM	12,371,131.
018.03.149076	Dinas Pertanian Kab. Kapuas	11,276,935.
018.03.149092	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PULANG PISAU	11,269,036.
018.03.169073	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	(3,770,959,129.)
018.03.169079	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN	(402,676,462.)
018.03.169090	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	(3,729,240.)
018.03.179066	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(204,244,520.)
018.03.179103	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(677,341,790.)
018.03.189080	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	(19,322,304,815.)
018.03.199077	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	(2,208,301,374.)
018.03.219055	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	212,790,809.
018.03.229067	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	(62,580,960.)
018.03.259062	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	(12,888,280.)
018.03.289077	DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA UTARA	(38,628,707.)
018.03.289206	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	(34,948,034.)
018.03.339183	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SORONG	(76,907,455.)
018.03.340141	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	(372,798,042.)
	TOTAL	(434,991,603,533.)

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp155.869.235.345,00 dan Rp27.124.400.858,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai, yaitu:

Akun	Uraian	2018	2017
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	155,859,250,345.	27,123,788,832.
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	9,985,000.	612,026.
	JUMLAH	155,869,235,345.	27,124,400,858.

Dengan rincian satker sebagai berikut:

AKUN : 391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
KODE	NMSATKER	RPHREAL
018.03.010082	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN & HORTKULTURA	(378,045,000.)
018.03.020072	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG JABAR	(911,075,710.)
018.03.069107	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. NAGAN RAYA	(1,250,000.)
018.03.079076	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(153,808,200,000.)
018.03.089076	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(5,741,276.)
018.03.119072	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	(19,712,138.)
018.03.139077	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(718,200,000.)
018.03.159062	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	127,813,280.
018.03.169073	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	(43,667,000.)
018.03.179103	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(14,055,000.)
018.03.259062	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	(7,117,501.)
018.03.339055	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT	(80,000,000.)
	JUMLAH	(155,859,250,345.)
AKUN : 391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	
018.03.179103	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(9,985,000.)
	TOTAL	(155,869,235,345.)

E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp914.550.000,00) dan 346.471.886,00. Koreksi ini terdapat pada Satker Kantor Pusat Ditrektorat Jenderal Tanaman Pangan yang merupakan koreksi beban atas realisasi belanja barang yang dibayar 1 kali.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.977.518.734.470,00 dan Rp6.350.778.656.284,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 54. Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017	NAIK (TURUN) %
Ditagihkan Ke Entitas Lain	6,100,524,309,795	6,365,995,681,558	(4.17)
Diterima Dari Entitas Lain	(131,243,072,739)	(25,954,355,015)	405.67
Transfer Keluar	(348,555,400)	(3,160,839,389)	(88.97)
Transfer Masuk	2,920,555,400	13,898,169,130	(78.99)
Pengesahan Hibah Langsung	5,665,497,414	-	0.00
TOTAL	**5,977,518,734,470**	**6,350,778,656,284**	**(5.88)**

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN), yang mana per 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp(131.243.072.739,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.100.524.309.795,00.

Saldo transfer keluar disajikan sebesar Rp(348.555.400,00) dan transfer masuk sebesar Rp2.920.555.400,00. Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Saldo pengesahan hibah langsung disajikan sebesar Rp5.665.497.414,00 yang merupakan pengesahan hibah langsung bentuk barang dan jasa dari FAO pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251) berdasarkan MP3HLBJS No. 04417 dan Persetujuan No. 201813923825100, tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.818.063.826.129,00 dan Rp1.268.023.976.123,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada Tahun 2018 jumlah satker lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkurang menjadi 70 satker dari sebelumnya 137 satker. Pengurangan ini pada jenis kewenangan Satker Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	SELISIH
1	Kantor Pusat	1	1	0
2	Kantor Daerah	2	2	0
3	Dekonsentrasi	33	33	0
4	Tugas Pembantuan	101	34	67
	JUMLAH	137	70	67

2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2018 mengelola Belanja Subsidi Benih berasal dari Bagian Anggaran 999.07 Belanja Subsidi dengan nilai aset sebesar Rp6.226.507.567,00 terdiri atas Piutang Bukan Pajak Rp12.453.015.134,00 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Subsidi (Rp6.226.507.567,00). Pada tahun 2018 tidak lagi menerima alokasi belanja subsidi benih.

3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada TA 2018 mengelola Cadangan Benih Nasional (CBN) berasal dari Bagian Anggaran 999.08 Belanja Lain-Lain dengan nilai aset sebesar Rp278.405.046.018,00 terdiri atas Piutang Bukan Pajak senilai Rp277.566.811.272,00; Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak senilai (Rp481.520.149,00); dan Persediaan senilai Rp1.319.754.895,00.
   Sejak TA. 2013 tidak lagi menerima alokasi belanja lain-lain.

4. Tunggak Bayar tahun 2017 senilai Rp17.043.034.000,00 berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk transfer uang dan belanja operasional terdapat pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi NTB, Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Satuan Kerja Kantor Pusat Ditjen Tanaman Pangan, dengan kegiatan berupa Pengembangan Kedelai, Peningkatan Varietas Unggul Baru (VUB), Pengembangan Jagung Hibrida, Dem Area, Packing SP3T dan bantuan benih padi, pengadaan terazolium, telah direalisasikan seluruhnya pada tahun 2018, seperti tampak pada tabel berikut.

No	Kode Satker	Uraian Satker	Nilai (Rp.)	Pembayaran (Rp.)	%
1	238251	Ditjen Tanaman Pangan (KP)	13,507,722,000	13,055,328,529	96.65
2	239265	Diperta. TPH Prov. NTB (TP)	1,993,483,000	1,993,483,000	100.00
3	249165	Diperta. Kebun Prov. NTT (TP)	1,541,829,000	1,541,829,000	100.00
			17,043,034,000	**16,590,640,529**	97.35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi tunggak bayar senilai Rp16.590.640.529,00 atau sebesar 97,35% dari nilai yang dianggarkan Rp17.043.034.000,00. Adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut.

Tunggakan Ditjen TP Tahun 2017 *(dlm Rp.)*

No.	Direktorat/Uraian	DIPA	POK	Hasil Reviu	Realisasi
1	**Dit. Akabi**		**4,016,472,000**		**3,995,680,000**
	a. Pengembangan Kedelai (1.581 Ha)	NTB	1,993,483,000	Itjen LHR No. R-87/PW.130/G.3/03/2018 tgl. 12 Maret 2013	1,993,483,000
	b. Pengembangan Kedelai (1.223 Ha)	NTT	1,541,829,000	Itjen LHR No. R-90/PW.130/G.3/03/2018 tgl. 15 Maret 2013	1,541,829,000
	c. Operasional	Pusat	481,160,000	BPK LHR No. 125/D102/2/2018 tanggal 24 Juli 2018	460,368,000
2	**Dit. Serealia**		**5,822,847,000**		**5,577,147,150**
	a. Peningkatan Produksi VUB (1297 Ha)	Pusat	5,178,921,000	BPKP LHR No.48/D102/2/2018 tgl 29 Maret 2018	5,178,921,000
	b. Pengembangan Jagung Hibrida (156 Ha)	Pusat	134,656,000	BPK LHR No. 125/D102/2/2018 tanggal 24 Juli 2018	134,089,150
	c. Operasional	Pusat	509,270,000		264,137,000
3	**Dit. Perlindungan**		**5,805,500,000**		**5,805,160,000**
	Dem Area (3.415 Ha) Jabar,Banten, Jateng, Jatim	Pusat	5,805,500,000	BPKP LHR No. 82/D102/2/2018 tgl 7 Mei 2018	5,805,160,000
4	**Dit. PPHTP**		**758,125,000**	BPK LHR No. 125/D102/2/2018 tanggal 24 Juli 2018	**747,789,499**
	a. Packing SP3T (langkat, Sumbawa, Lamtim, Banyuasin, Luwuk)	Pusat	619,000,000		619,000,000
	b. Operasional	Pusat	139,125,000		128,789,499
5	**Dit. Perbenihan**		**640,090,000**	BPK LHR No. 125/D102/2/2018 tanggal 24 Juli 2018	**464,863,880**
	a. Bantuan Benih Padi, pengadaan tetrazolium	Pusat	105,500,000		105,500,000
	b. Operasional	Pusat	534,590,000		359,363,880

5. Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta No. SP3N-258/PUPNC.10.05/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Atas Nama Sdr. Medy Pramady Rukmana, SP, sehingga pengurusan piutang negara tersebut beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI

Jakarta yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.

6. Masih terdapat permasalahan dalam e Rekon terkait Transfer Keluar/Transfer Masuk:

No	Kode	Uraian	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih
1	-.-.-	SATKER TIDAK ADA	133111	Gedung dan Bangunan	0	018.03.020072	BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARAWANG JABAR	2,572,000,000	-2,572,000,000

Selisih transfer keluar dan transfer masuk ini terjadi karena pencatatan transfer keluar dari Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan tahun 2017, sementara pencatatan transfer masuk pada Satker BBPOPT Jatisari dilakukan pada tahun 2018.

7. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Audited, masih terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Segmen COA – Pengembalian Belanja pada Satker Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur (059106) dikarenakan adanya perbedaan kode pengisian Program, Kegiatan, dan Output pada form isian pengembalian belanja. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada satker terkait, kode yang benar adalah sesuai yang diinput pada Aplikasi SAIBA namun belum sempat dilakukan ralat ke KPPN karena sudah terlambat.

Kode	Uraian	SD-CP P/K/O	Kode Akun	SIAP	SAI	TDK
018.03.059106	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN	010.ZZ.ZZZZ.ZZZ	526312	-23,416,000	0	-23,416,000
	PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	010.06.1764.641	526312	0	-23,416,000	23,416,000

8. Pada tahun 2018, beberapa satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan menggunakan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Latar belakang digunakannya RPL ini karena pada tahun 2018 banyak terjadi pembayaran tunggakan kegiatan TA 2017 dikarenakan bantuan dalam bentuk uang ke kelompok tani banyak yang tidak sampai ke penerima pada akhir tahun anggaran karena beberapa sebab (rekening sudah tidak aktif, kesalahan pengetikan nama, rekening yang sudah ada dimanfaatkan untuk menampung bantuan dari Eselon I lain) dan proses revisi memerlukan waktu yang lama.

   Oleh karena itu dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan meningkatkan fungsi kontrol PPK terhadap penyaluran bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada kelompok/penerima bantuan, mekanisme LS transfer uang dapat melalui rekening penampungan Satker bekerjasama dengan Bank Penyalur, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima.

Sebagai dasar hukum penggunaan RPL adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 trntang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Tanaman Pangan TA 2018 dan 2019. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014, dengan mekanisme KPA mengusulkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Kantor Perbendaharaan untuk mendapatkan Rekening Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah. Adapun penyaluran kembali kepada penerima Bantuan Pemerintah dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan pemerintah.

9. Dalam Laporan Keuangan BA 018.03 Tahun 2018 Audited terdapat beberapa perbaikan/penyesuaian yang harus mendapatkan persetujuan dari BPK RI yang diimplementasikan dalan Usulan Jurnal Koreksi. Adapun rincian UJK adalah sebagai berikut:

Satker	UJK
209069	Perbaikan TDK Segmen COA - Pendapatan karena satker salah input yang seharusnya akun 425289 tetapi diinput 425691
189080	Perbaikan TDK Segmen COA - Pendapatan karena satker salah input yang seharusnya akun 425112 tetapi diinput 425691
069264	Perbaikan TDK Segmen COA - Pendapatan karena satker salah input yang seharusnya akun 425289 tetapi diinput 425691
039103	koreksi atas pengembalian belanja yang seharusnya merupakan pengembalian belanja satker 039151 (Dinas provinsi TP)
119129	Koreksi aset tetap minus
269064	Salah Mengeluarkan akun Diserahkan kepada Masyarakat 526311 yang seharusnya 526112
199125	mencatat bank garansi yang diklaim oleh KPPN dan sisa pekerjaan tersebut diteruskan di tahun 2019 (masuk DIPA 2019) berdasarkan hasil reviu Itjen
039151	Mencatat setoran sisa banpem di rekening yang tidak digunakan oleh Keltan
	Koreksi pengembalian belanja 526 yang sebelumnya dicatat di Kab. Grobogan
119072	Normalisasi Gedung dan Bangunan
020072	perbaikan nilai buku minus
189132	Mencatat Bank Garansi yang diklaim oleh KPPN dan sisa pekerjaan tersebut diteruskan di tahun 2019 (masuk DIPA 2019) berdasarkan hasil reviu Itjen
238251	Jurnal untuk mencatat secara akrual setoran pegembalian dobel bayar
	Jurnal untuk mencatat koreksi beban 526 dan beban persediaan karena dobel bayar
	Jurnal untuk mencatat secara akrual beban gaji yang dibayarkan di tahun 2019
	Jurnal untuk mencatat koreksi akun pengembalian belanja 526, semula 526311 menjadi 526312
	Jurnal untuk mencatat secara akrual pendapatan jasa pengujian untuk sertifikat yang diterbitkan di tahun 2019